



Providing Energy for Sustainable Future

Menyediakan Energi untuk
Masa Depan yang Berkelanjutan

Laporan Tahunan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) 2022



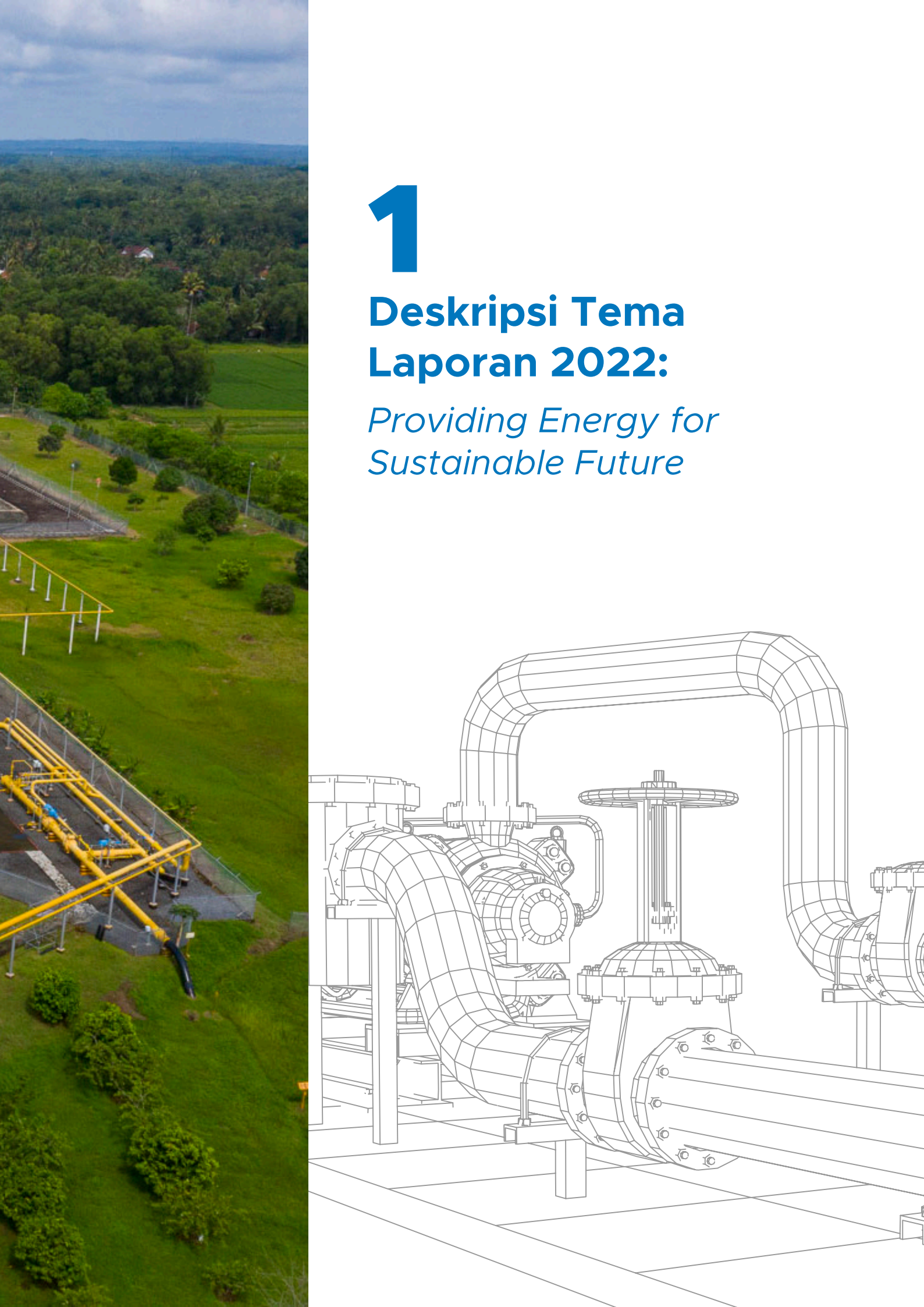




DAFTAR ISI

1	Deskripsi Tema Laporan 2022: <i>Providing Energy for Sustainable Future</i>	3
2	Ikhtisar Kinerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	7
3	Laporan Manajemen	13
4	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	17
	4.1 TJSL bagi PGN	19
	4.2 Landasan Hukum TJSL	25
	4.3 TJSL dan Masa Depan yang Berkelanjutan	27
5	Program Pendanaan UMK	29
6	Pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	33
	6.1 Pilar Sosial	35
	6.2 Pilar Ekonomi	38
	6.3 Pilar Lingkungan	40
	6.4 Pilar Hukum & Tata Kelola	45
7	Desa Binaan	49
8	Lain-lain	55



The image is a composite. On the left, an aerial photograph shows a lush green landscape with a yellow pipeline running through it. In the background, there's a dense forest and a small building. On the right, a white wireframe line drawing of industrial machinery, including pipes and a valve, is overlaid on a white background.

1

Deskripsi Tema Laporan 2022:

*Providing Energy for
Sustainable Future*



PERJALANAN TEMA LAPORAN



DESKRIPSI TEMA LAPORAN 2022

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, ada kecenderungan yang meluas, dimana pertumbuhan ekonomi yang cepat cenderung diiringi dengan potensi degradasi lingkungan. Dunia digambarkan berada pada posisi rentan akibat bencana ekologis yang kian mengancam¹. Kondisi ini umumnya dialami negara yang tengah mengalami fase pertumbuhan ekonomi cepat seperti Indonesia.

Keberhasilan dalam “menyeberang” dari garis masyarakat agraris ke masyarakat industri telah menyebabkan penurunan fungsi lingkungan. Tantangan seperti kelangkaan sumber daya alam, polusi, dan banjir menjadi bagian yang tidak terpisahkan². Diperlukan suatu komitmen dan kolaborasi bersama guna merespon kondisi yang ada.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi jawaban sekaligus komitmen, serta kolaborasi global. Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan seiring. Dikotomi



ekonomi dan ekologi menjadi sesuatu yang tidak relevan. Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi lingkungan juga tetap lestari. Inilah energi yang menjadi komitmen bersama, demi menjamin masa depan yang berkelanjutan.

Dengan semangat pembangunan berkelanjutan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (selanjutnya disebut PGN) sebagai entitas publik, berkomitmen untuk terus menciptakan dampak positif di setiap rantai aktivitas. PGN mengintegrasikan, serta membangun sinergi ragam investasi sosial (program, serta pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL) untuk menciptakan nilai bersama, dan manfaat yang luas kepada seluruh pemangku kepentingan.

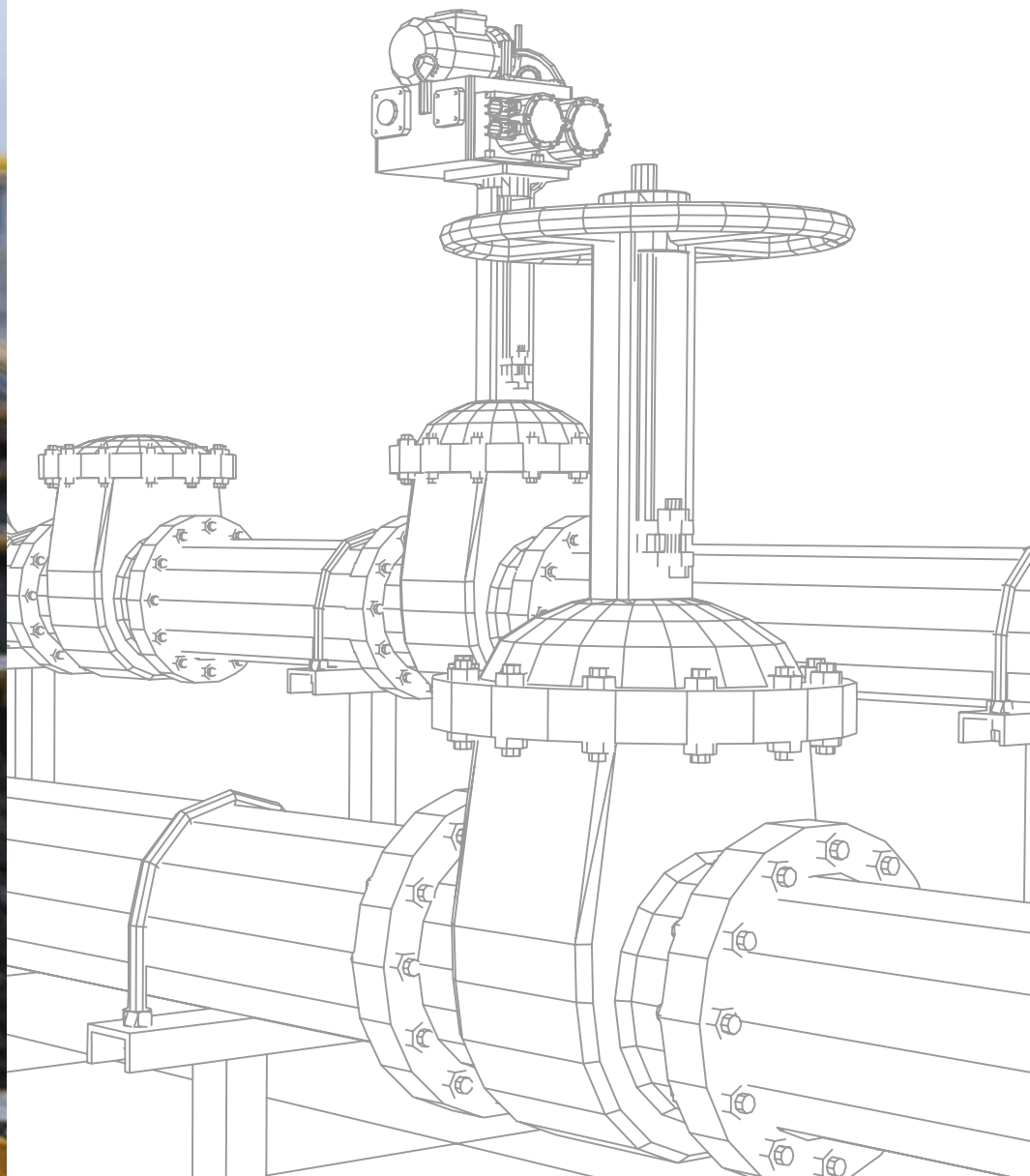




A photograph of yellow industrial pipes at a facility, with a large pipe in the foreground and others in the background under a cloudy sky.

2

Ikhtisar Kinerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)



IKHTISAR KINERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Bagi investor dan pemegang saham, penyusunan, serta penerapan TJSL yang strategis merupakan sebuah peluang yang dapat diadopsi untuk membedakan diri mereka dari pesaing³. Dengan implementasi TJSL yang tepat, dinamika positif seperti: (1) lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal; (2) mitigasi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan siklus hidup (*life cycle*); serta (3) pembangunan kapasitas pihak terdampak, menjadi sebuah keniscayaan⁴.

Secara khusus, PGN berkomitmen untuk menjadikan TJSL sebagai bagian dari investasi sosial yang dijalankan di setiap rantai nilai. Tujuannya: (1) Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan; serta (2) berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik yang terdampak secara langsung, maupun tidak. Pelaksanaan TJSL pun dilakukan berpedoman pada regulasi yang berlaku di Indonesia, serta panduan dan komitmen global terkait pembangunan berkelanjutan.

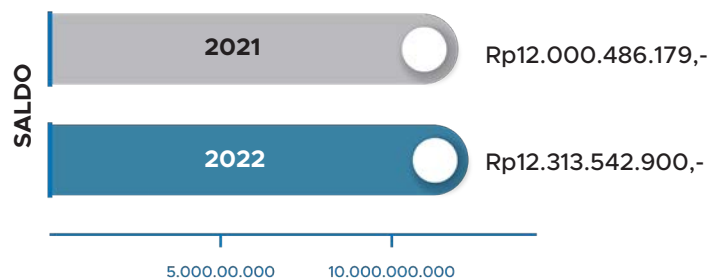
Ikhtisar kinerja TJSL dalam program serta pilar prioritas PGN dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

PUMK merupakan program pemberdayaan dengan target kelompok UMKM. Pelaksanaan program dilakukan melalui pemberian bantuan modal kerja, pembinaan, dan peningkatan akses pemasaran. Per tahun 2022, tercatat 216 entitas menjadi mitra binaan PGN dalam kerangka Sinergi BUMN.

Tabel 1. Realisasi PUMK

Sumber: diolah internal PGN



Catatan:

1. Alokasi sumber daya tersedia untuk PUMK awal tahun sebesar Rp 12.313.542.900,- (terrealisasi sebesar 99,74% dari rencana).

Efektivitas Penyaluran Dana PUMK

Pada tahun pelaporan, PGN telah menyusun sejumlah skenario perencanaan guna penyaluran modal usaha kepada UMKM, baik dalam kerangka Sinergi BUMN, ataupun bentuk lainnya. Namun implementasi atas sejumlah skenario perencanaan ini belum dapat direalisasikan akibat fokus PGN yang masih banyak tercurah pada upaya penagihan pengembalian pokok pinjaman.

Meski demikian, sesuai Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 Tanggal 10 November 2022 tentang kerja sama Program PUMK, PGN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 16 Desember 2022 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan Program PUMK.

Kolektabilitas Pengembalian Pokok Pinjaman

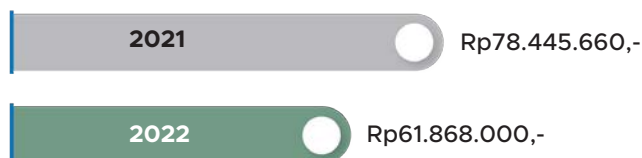
Dalam upaya penagihan pengembalian pokok pinjaman mitra binaan, PGN telah melakukan berbagai aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap Mitra Binaan PGN, antara lain dengan mengirimkan surat penagihan, dan kunjungan langsung kepada Mitra Binaan PGN. Selain itu, PGN juga mengikut sertakan mitra binaan dalam kegiatan pameran produk lokal UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan UMK Binaan PGN.

Pada periode pelaporan, jumlah pembayaran pinjaman dari mitra binaan sejumlah Rp61.868.000 atau 61,87% dari rencana dan pengembalian dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur adalah sebesar Rp50.000.000 atau 10% dari rencana. Hal ini dikarenakan kendala dalam menghubungi mitra binaan yang telah berganti alamat, kondisi keuangan mitra binaan, serta kondisi keuangan BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur yang tidak memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam mengangsur pengembalian dana kepada PGN. Meskipun begitu, PGN tetap konsisten dalam menjalankan strategi pemulihan piutang dan optimis dengan peningkatan pengembalian pinjaman di tahun depan.

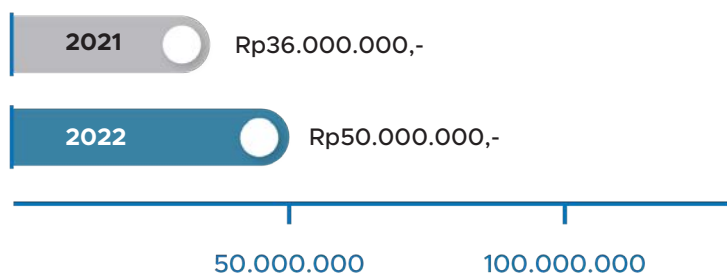
Tabel 2. Kolektabilitas Pengembalian Pokok Pinjaman

Sumber: diolah internal PGN

Pengembalian Pinjaman dari Mitra Binaan



Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur





b. Program 4 (Empat) Pilar TJSL

Pada tahun pelaporan, PGN telah merealisasikan program TJSL perusahaan dengan total dana tersalurkan sebesar Rp46.635.297.258 atau 93% dari rencana. Program TJSL disalurkan berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu:



Selain itu, target capaian Program TJSL PGN berfokus untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan 6 prioritas yakni nomor 7, 8, 12, 13, 14, dan 15 serta mendukung bisnis inti dalam kerangka *Creating Shared Value* (CSV).

Tabel 3. RKA 2022 dan Audit 2022

Sumber: diolah internal PGN, 2023

Pilar Sosial



RKA 2022	31.539.647.578
Audit 2022	29.916.490.859

Pilar Ekonomi



RKA 2022	8.651.836.422
Audit 2022	8.312.306.358

Pilar Lingkungan



RKA 2022	10.100.219.711
Audit 2022	8.406.500.040

Pilar Hukum dan Tata Kelola*



RKA 2022	-
Audit 2022	-

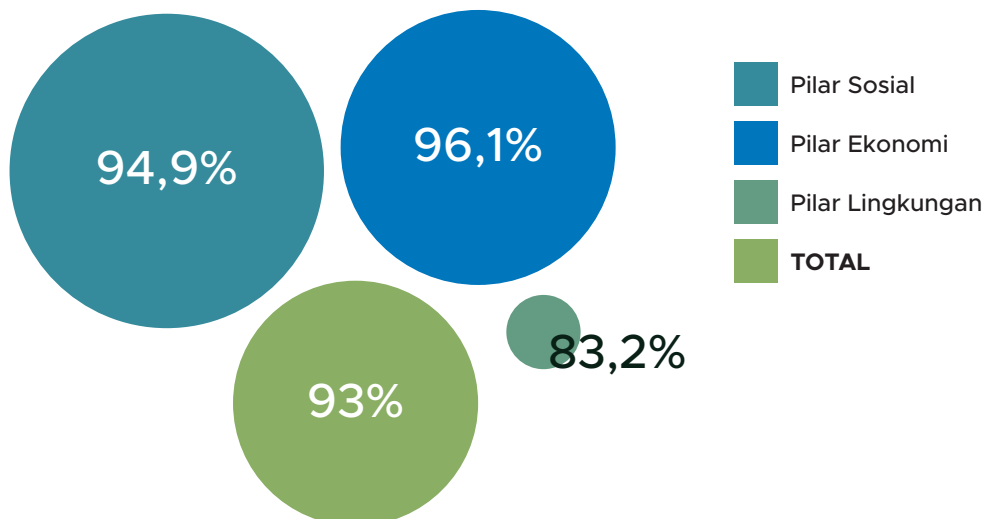
25.000.000.000 50.000.000.000

*Pilar hukum dan tata Kelola termasuk dalam anggaran **Non CID**



Sumber: diolah internal PGN, 2023

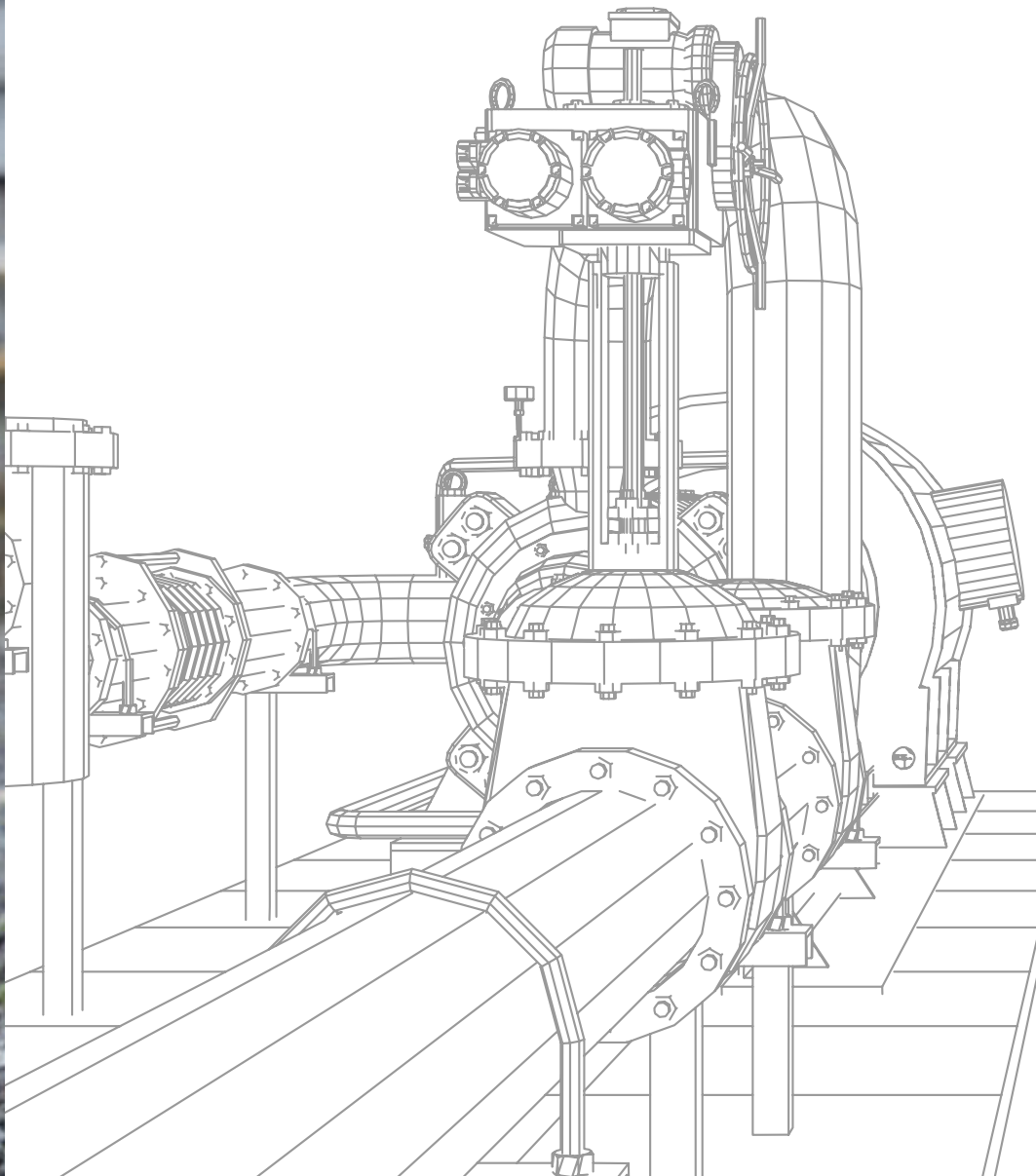
Total Investasi Sosial dari 4 Pilar





3

Laporan Manajemen



LAPORAN MANAJEMEN

Para pemegang saham yang terhormat,
Kami kembali menyampaikan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), kali ini untuk tahun 2022. Laporan ini memuat kinerja PGN dalam melaksanakan Program TJSL pada periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022. Melalui Laporan Tahunan TJSL ini, Pemegang saham dapat menilai fokus dan kontribusi kami dalam pelaksanaan TJSL yang berorientasi pada pencapaian TPB, serta komitmen global lainnya.

Dalam pelaksanaan TJSL ini, terdapat PUMK yang dahulu disebut Program Kemitraan (PK). Kemudian terdapat program-program yang dahulu disebut Program Bina Lingkungan (BL) yang berorientasi pada 7 aspek yang diatur oleh Pemerintah, kini diarahkan untuk berfokus kepada empat pilar utama, yaitu: Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola. Empat pilar utama ini kemudian dipetakan ke dalam poin-poin TPB.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan dan arahan pemegang saham, pada tahun 2022, kami berfokus untuk mengusahakan kolektabilitas pokok pinjaman dari dana PUMK yang telah disalurkan kepada mitra binaan. Pada Tahun 2022, kami juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk penyaluran PUMK kedepannya.

Pada tahun pelaporan, PGN mengalokasi investasi sosial sebesar Rp46.635.297.258 (teralisasi 93% dari rencana kerja) untuk pelaksanaan program pada empat pilar utama, sesuai arahan Kementerian BUMN.

Pada periode tahun pelaporan ini, Kami menambahkan proses pembelajaran untuk meluaskan cakrawala pengetahuan kami dan para pemangku kepentingan relevan. Hal ini berbeda dari desain program TJSL

sebelumnya, yang sebatas mengikuti alur tahapan pada umumnya, berupa: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi.

Pada tahun pelaporan, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di desa binaan menunjukkan nilai 3,7 dengan nilai mutu pelayanan kategori A dengan predikat sangat puas. Adapun pelaksanaan Program Desa Binaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, telah memberikan manfaat kepada 3.655 warga Indonesia. Hingga saat ini, PGN telah memiliki tujuh desa binaan yang akan terus kami kembangkan secara konsisten.

Kami berkomitmen untuk terus fokus pada upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemegang saham, melalui praktik bisnis terbaik. Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dan ekologi dapat berjalan seiring sejalan.

Sebagai penutup, atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung upaya peningkatan kinerja TJSL di tahun 2022.

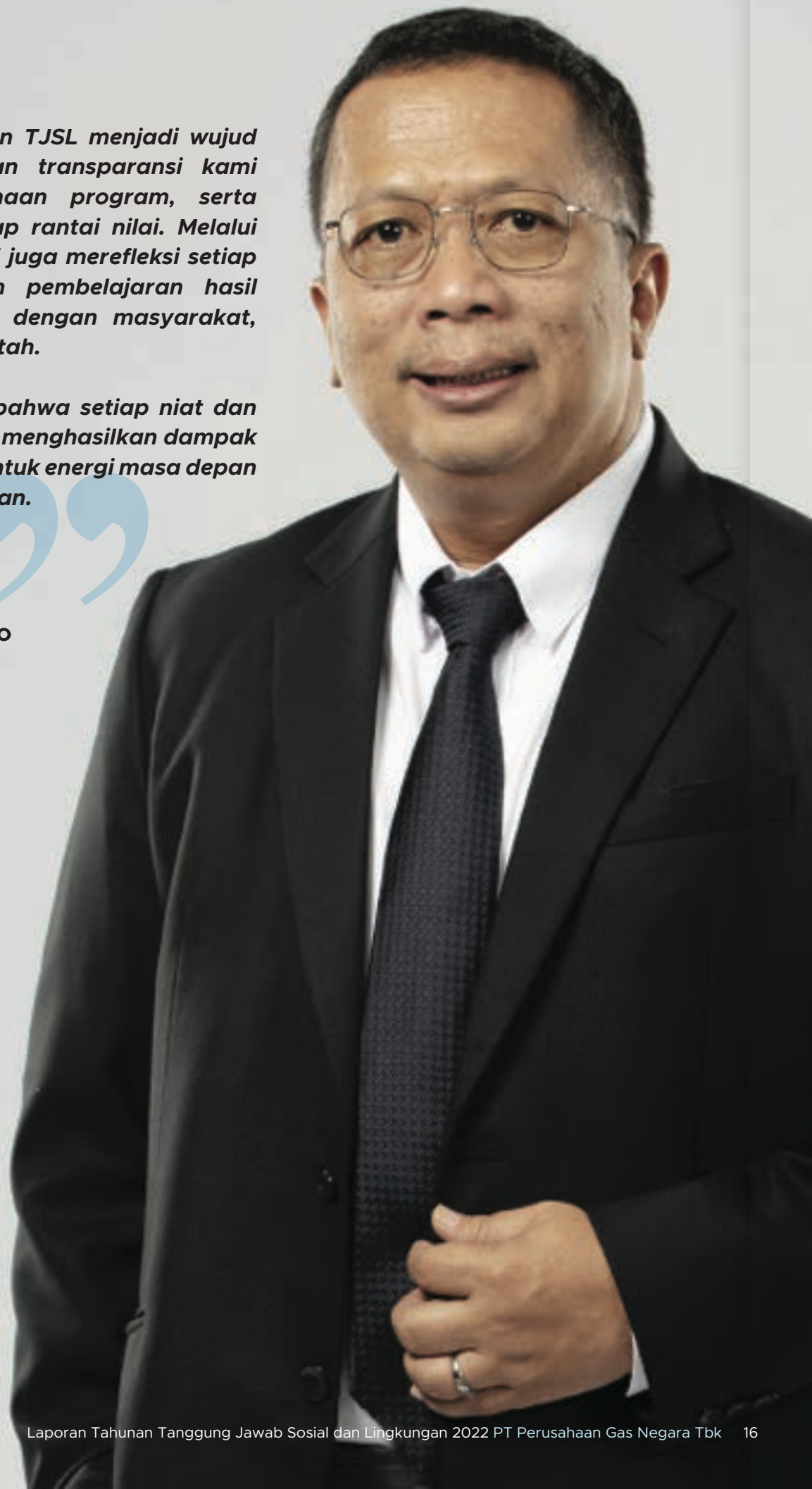
Jakarta, 12 Mei 2023

M. HARYO YUNianto
Direktur Utama

Laporan Tahunan TJSL menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi kami dalam pelaksanaan program, serta aktivitas di setiap rantai nilai. Melalui laporan ini, kami juga merefleksi setiap pencapaian dan pembelajaran hasil kolaborasi, baik dengan masyarakat, maupun pemerintah.

Kami meyakini, bahwa setiap niat dan tindak baik akan menghasilkan dampak yang baik pula untuk energi masa depan yang berkelanjutan.

M. HARYO YUNianto
Direktur Utama

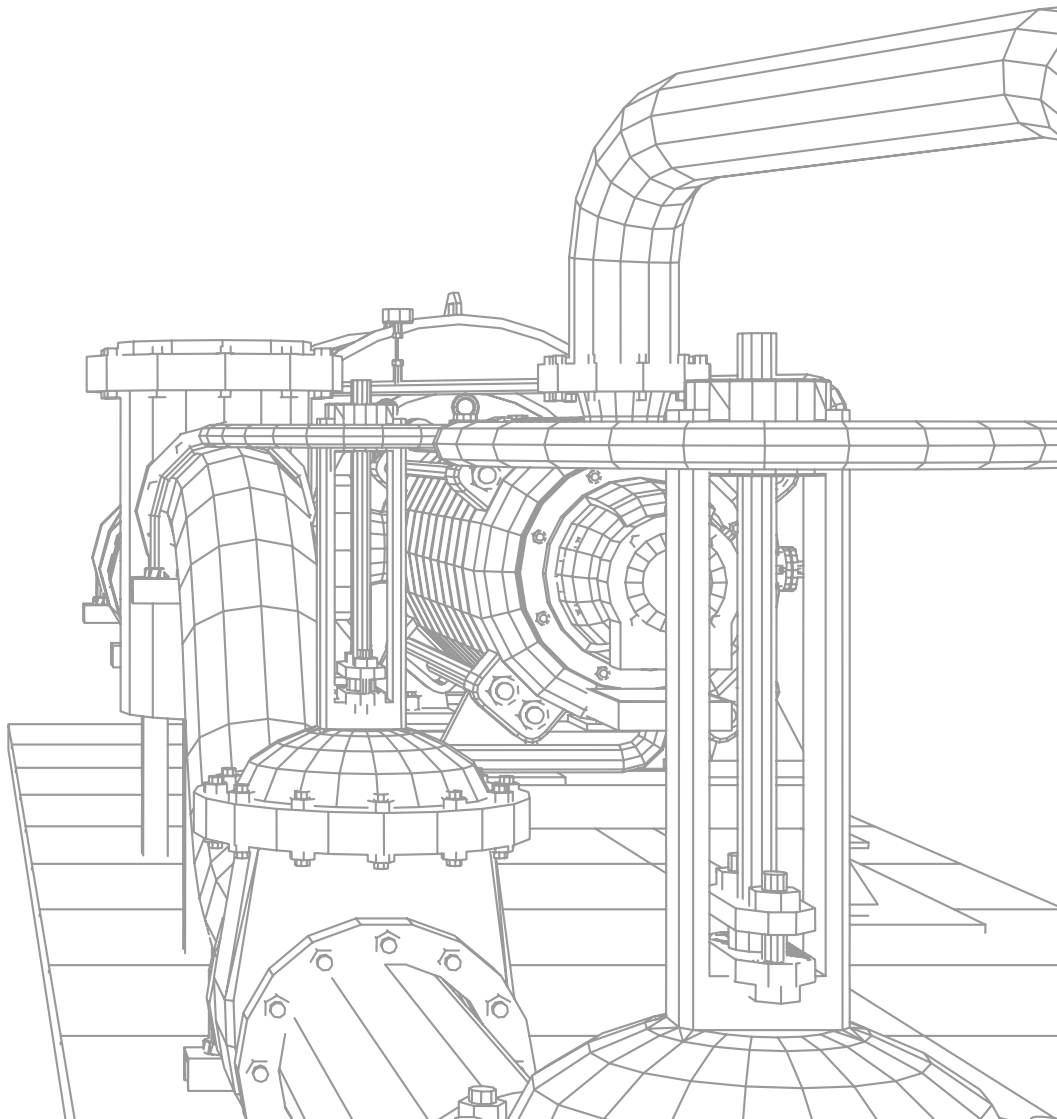






4

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan





4.1 TJSL bagi PGN

Merujuk pakar pemasaran Philip Kotler dan Nancy Lee (2005), TJSL didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik, dengan berkontribusi sebagian sumber dayanya⁵. Sementara pendapat lain menyebut bahwa TJSL adalah bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka, serta berdasarkan pada nilai-nilai moral, dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan. Sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap publik, agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat meningkat, sekaligus menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

PGN menempatkan TJSL sebagai suatu komitmen penting, yakni konsep keberlanjutan yang berkelanjutan, yang diharapkan menjadi jawaban dalam mengatasi potensi degradasi lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang dijalankan perusahaan. Implementasinya meliputi strategi yang sejalan dengan TPB/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), berupa aktivitas yang memberikan manfaat pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

4.1.1 Prinsip-Prinsip Program TJSL

Dengan menjadikan TJSL sebagai bagian dari pendekatan dan strategi bisnis, PGN melaksanakannya dengan menjunjung empat prinsip berikut:



Terintegrasi

Berdasarkan analisis risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.

01



Terarah

Memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan.

02



Terukur Dampaknya

Memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan.

03



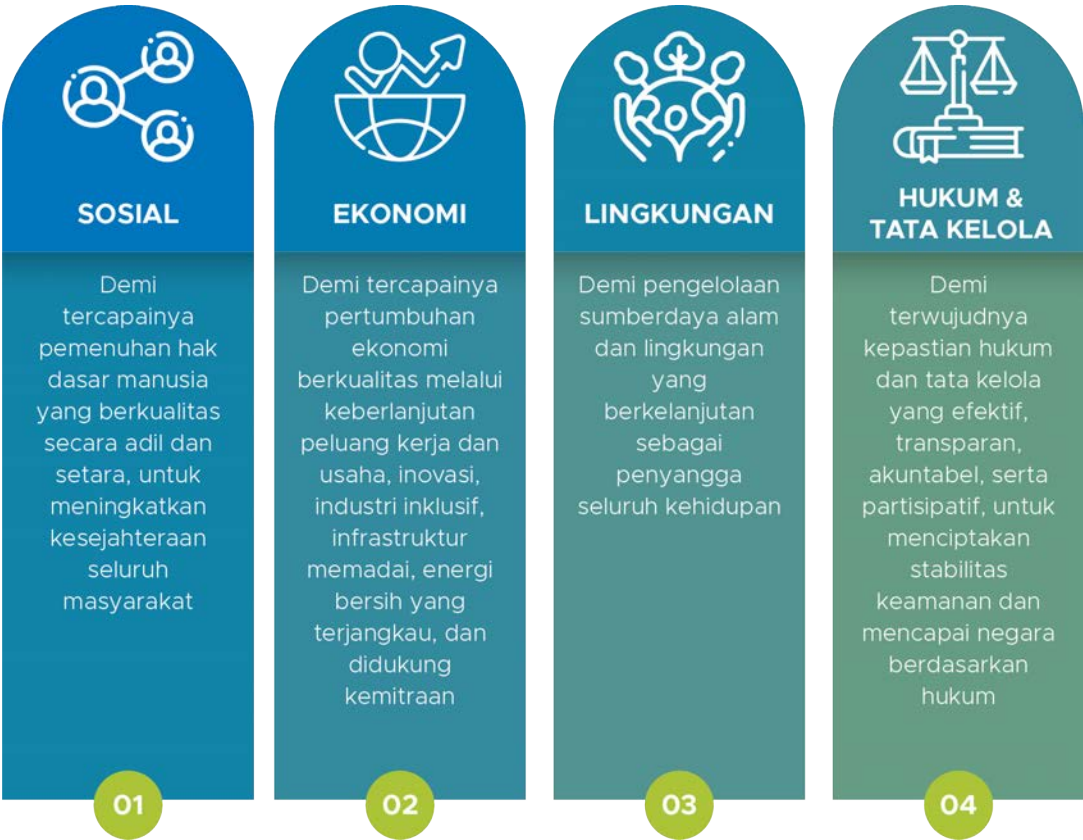
Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

04

4.1.2 Pilar Utama Pelaksanaan Program TJSL

Adapun pilar-pilar yang menyokong diselenggarakannya Program TJSL ialah:



4.1.3 ISO 26000 sebagai Pedoman Pelaksanaan TJSL

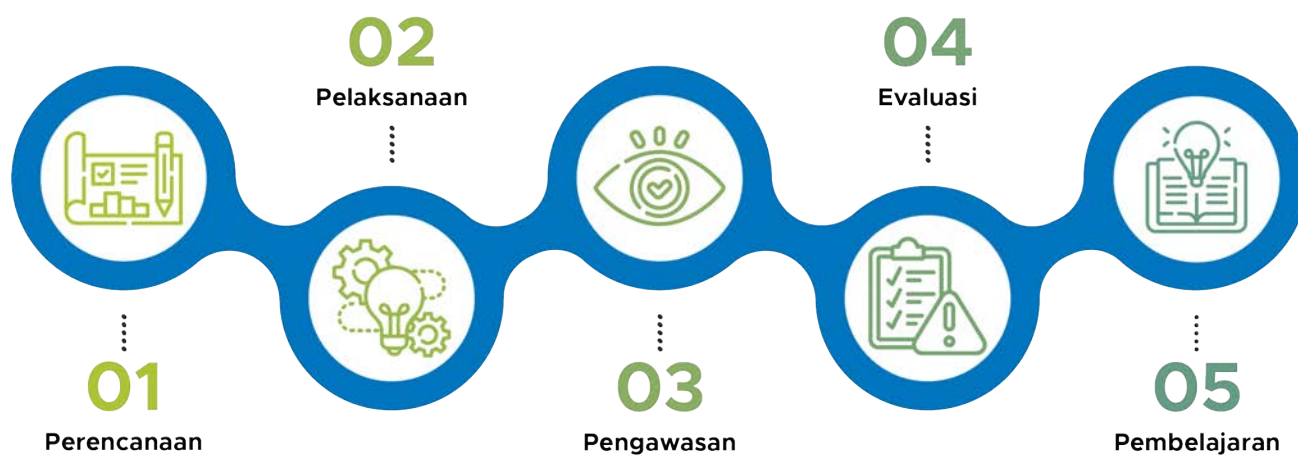
Acuan pelaksanaan sekaligus tolok ukur evaluasi TJSL adalah ISO 26000:





4.1.4 Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pembelajaran (Plan, Do, Monitoring, Evaluation and Learning)

PGN melaksanakan Program TJSL secara sistematis, terpadu, dan berpedoman pada rencana kerja, agar tujuan program dapat dipenuhi. Terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan TJSL, yaitu:



Tahap **01** Perencanaan

Perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, yang meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta, serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang, untuk mencapai hasil terbaik⁶.

Tahap **02** Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci^{7,10}.

Tahap **03** Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya pengawasan, pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil⁸.



Tahap 04 Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan, dengan hasil capaian saat itu. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang timbul. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pekerjaan, yang diperoleh dari hasil pengawasan⁹.

Lebih lanjut evaluasi dilaksanakan dengan tujuan:

- Untuk mengkaji kesesuaian kegiatan dengan perencanaan.
- Mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut.
- Melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan.
- Untuk mengetahui keterkaitan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar didapatkan indeks kemajuan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Tahap 05 Pembelajaran

Fokus dari tahap pengawasan dan tahap evaluasi adalah untuk melaporkan bagaimana capaian atas *output*, *outcome*, dan *impact* dihasilkan. Meskipun melaporkan *output* dan *outcome* merupakan tujuan penting, tahap pembelajaran dari program ataupun kegiatan juga sama pentingnya. Pengawasan dan evaluasi yang baik akan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan kerja.

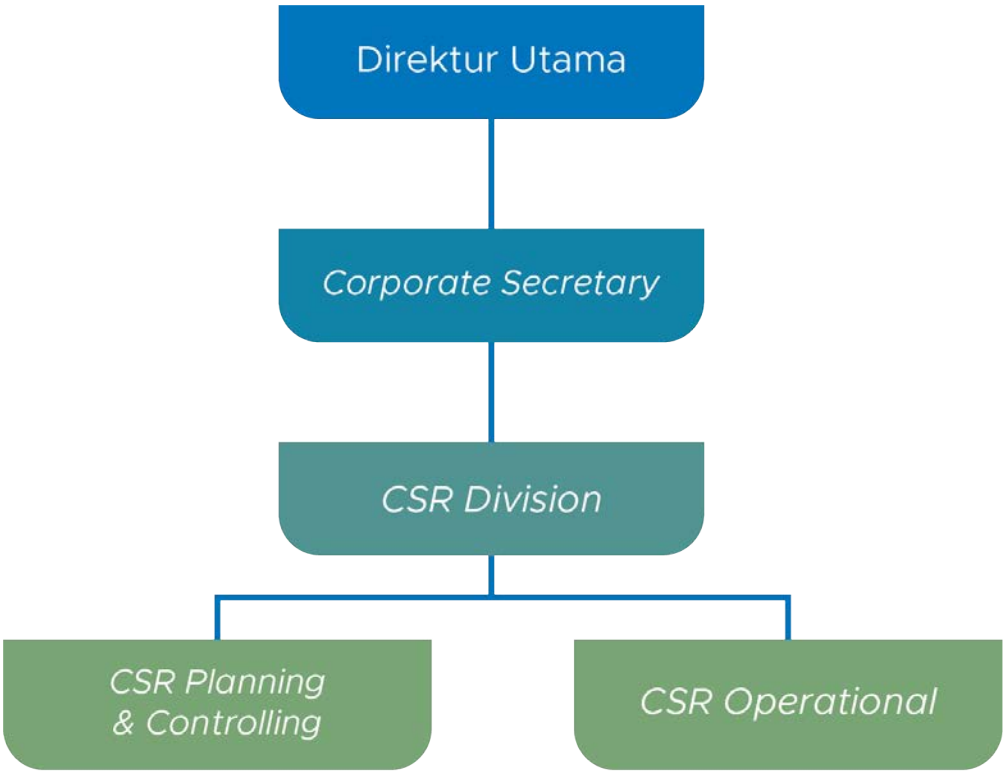
4.1.5 Kebijakan Umum TJSL

Dalam menjalankan program TJSL, PGN memiliki kebijakan penyaluran yang terdiri dari:

- a. Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- b. Menunjang keberlanjutan perusahaan dengan dukungan dari seluruh stauan kerja, dalam membantu pelaksanaan program CID
- c. Mengedepankan nilai-nilai budaya perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- d. Memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan, peningkatan kondisi sosial, dan kesejahteraan masyarakat, serta perbaikan lingkungan sekitar, terutama di wilayah operasi Grup PGN
- e. Meningkatkan pemahaman publik tentang PGN melalui informasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- f. Membentuk citra positif Grup PGN kepada pemangku kepentingan
- g. Menyalurkan bantuan secara langsung dan/atau melalui kerja sama dengan penyedia bantuan, untuk penerima bantuan

4.1.6 Divisi Pengelola TJSL

Seluruh tahapan program TJSL dikelola oleh Divisi *Corporate Social Responsibility* (Divisi CSR). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 035500.K/OT.00/ PDO/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi Dasar (BOD-2) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan Surat Penugasan *Division Head, Human Capital Management*, struktur organisasi Divisi CSR adalah sebagai berikut:





Berikut adalah visi, misi, dan moto Divisi CSR dalam penyelenggaraan TJSL di PGN:



VISI

Mendukung Visi PGN melalui Program CID yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.



MISI

Melaksanakan Program CID yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja perusahaan
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. berkontribusi secara aktif dalam menjaga pelestarian alam.

Meningkatkan kualitas Program CID melalui kerja sama dengan satuan kerja lain, anak perusahaan, afiliasi, atau pihak ketiga.

Menjaga keharmonisan hubungan perusahaan dengan *stakeholders* melalui Program CID



MOTO

Sejahtera, Harmonis, Amanah, Responsif, Empati

pgnshare

Sejahtera, Harmonis, Amanah, Responsif, Empati



KOMITMEN POKOK

1



Berkontribusi terhadap peningkatan
KESEJAHTERAAN
masyarakat

2



Menciptakan hubungan
HARMONIS dengan
Stakeholder

3



Program Tanggung Jawab
Sosial
dan Lingkungan yang
berkelanjutan merupakan
AMANAH

4



RESPONSIF terhadap
masalah sosial masyarakat

5



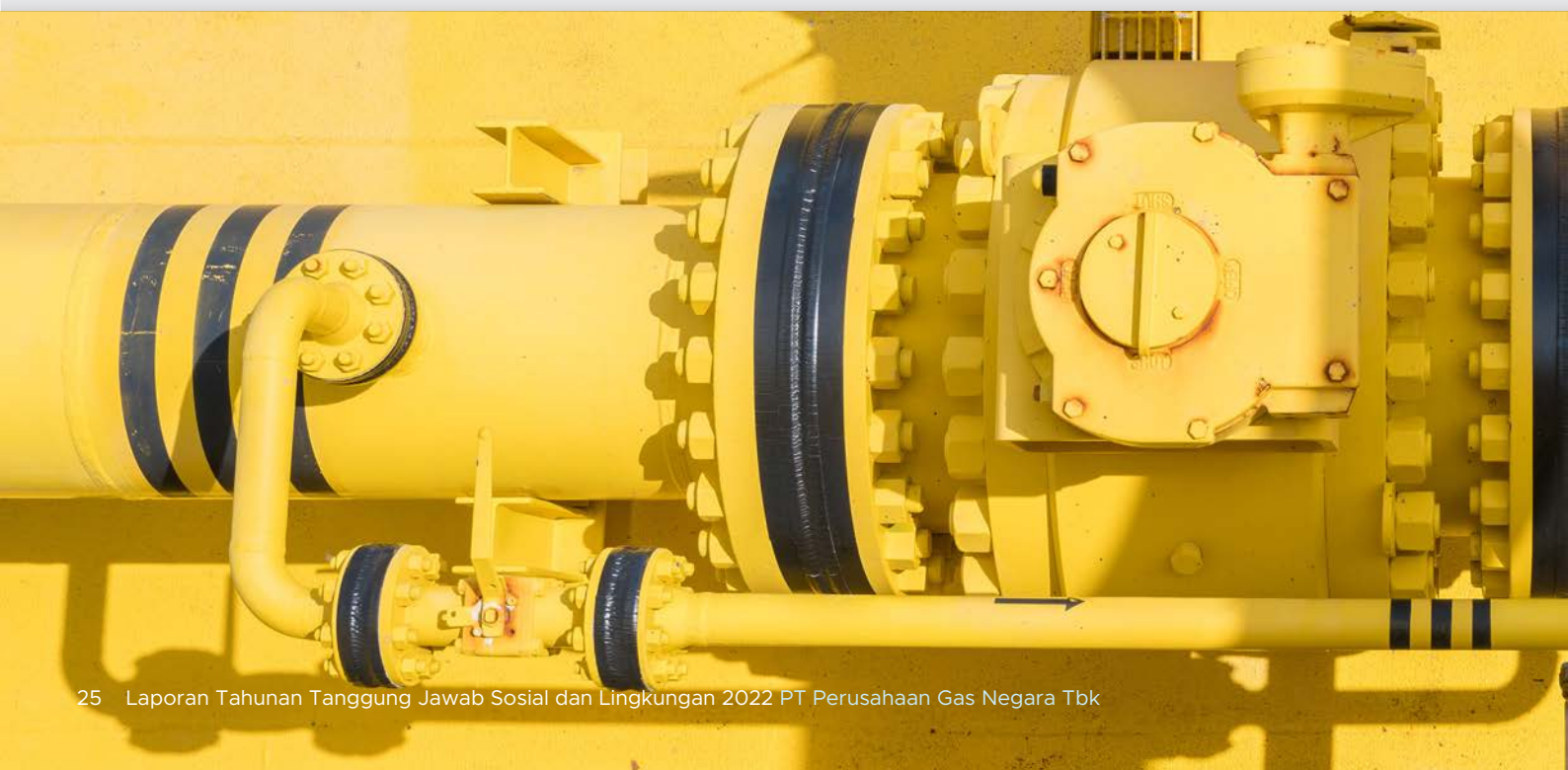
EMPATI terhadap masalah
sosial masyarakat



4.2 Landasan Hukum TJSL

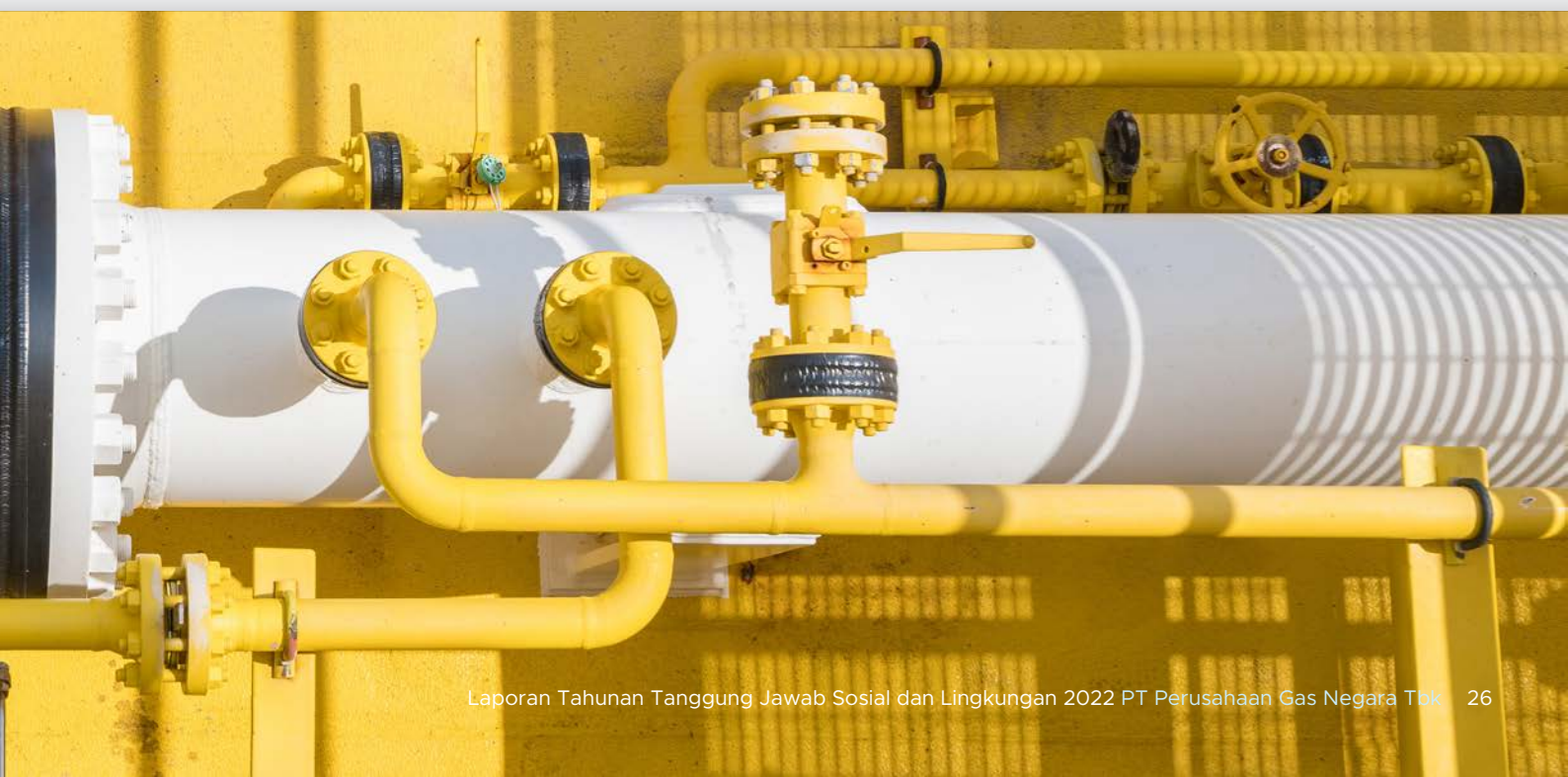
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PGN mengacu kepada berbagai peraturan perundangan yang diamanatkan oleh negara, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Perihal Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/ MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang: Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/ MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/ MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/ MBU/2012 tanggal 11 Mei 2012.





8. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/ MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang: Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/ MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/ MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, serta Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahannya Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN.
10. Nota Dinas Nomor 024400.ND/HM.05/ FIN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Kebijakan terkait pelaksanaan PKBL.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/ MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/ MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/ MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/ MBU/04/2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/ MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

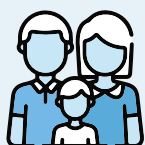




4.3 TJSL dan Masa Depan yang Berkelanjutan

KEBERLANJUTAN DALAM ANGKA

Dalam era pandemi COVID-19, angka kemiskinan global **meningkat** dari **8,3%** di tahun 2019 menjadi **9,2%** di tahun 2020.



Untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir, jumlah **pekerja yang masuk dalam kategori berkeluarga**, dan berada **di bawah** garis kemiskinan, mengalami peningkatan dari **6,7%** pada 2019, menjadi **7,2%** pada 2020.

Ini berarti terdapat **delapan juta** pekerja yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Diperkirakan **147 juta** anak telah **kehilangan lebih dari separuh** waktu belajar di kelas selama **dua tahun** terakhir karena pandemi COVID-19. Estimasi kehilangan total pendapatan masa depan yang dialami mencapai **17 triliun** dolar AS.



Proporsi anak usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, **meningkat** dari **54%** pada 2015 menjadi **58%** pada 2020, meski dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat.

Secara global, diperkirakan **sembilan juta** anak **memiliki risiko** masuk kategori pekerja akibat meningkatnya kemiskinan yang disebabkan pandemi.



Diadaptasi dari: *Sustainable Development Goals Report*¹³



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Meski gema TPB lantang terdengar, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan tak mudah. Perlu komitmen para pihak untuk konsisten bertindak bersama.

TPB adalah hasil kesepakatan anggota Persatuan Bangsa-Bangsa guna melaksanakan pola pembangunan dengan empat dimensi pilar, yakni: pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.

Pilar pembangunan sosial memiliki lima tujuan: tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; dan kesetaraan gender. Pilar pembangunan ekonomi juga memiliki lima tujuan, yakni: energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Sementara di bidang lingkungan ada enam tujuan, yaitu: air bersih dan sanitasi layak; kota dan pemukiman berkelanjutan; konsumsi dan produksi berkelanjutan; penanganan dan perubahan iklim; ekosistem lautan; dan ekosistem darat. Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut tentu saja mesti didukung oleh pilar pembangunan hukum dan tata kelola, dengan “kemitraan untuk mencapai tujuan” dimaksud^{11,12}.

Indonesia telah mengadopsi TPB, dan untuk mewujudkannya, dibuat payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Kelembagaannya pun sudah dibentuk, dan berfungsi sampai kini.

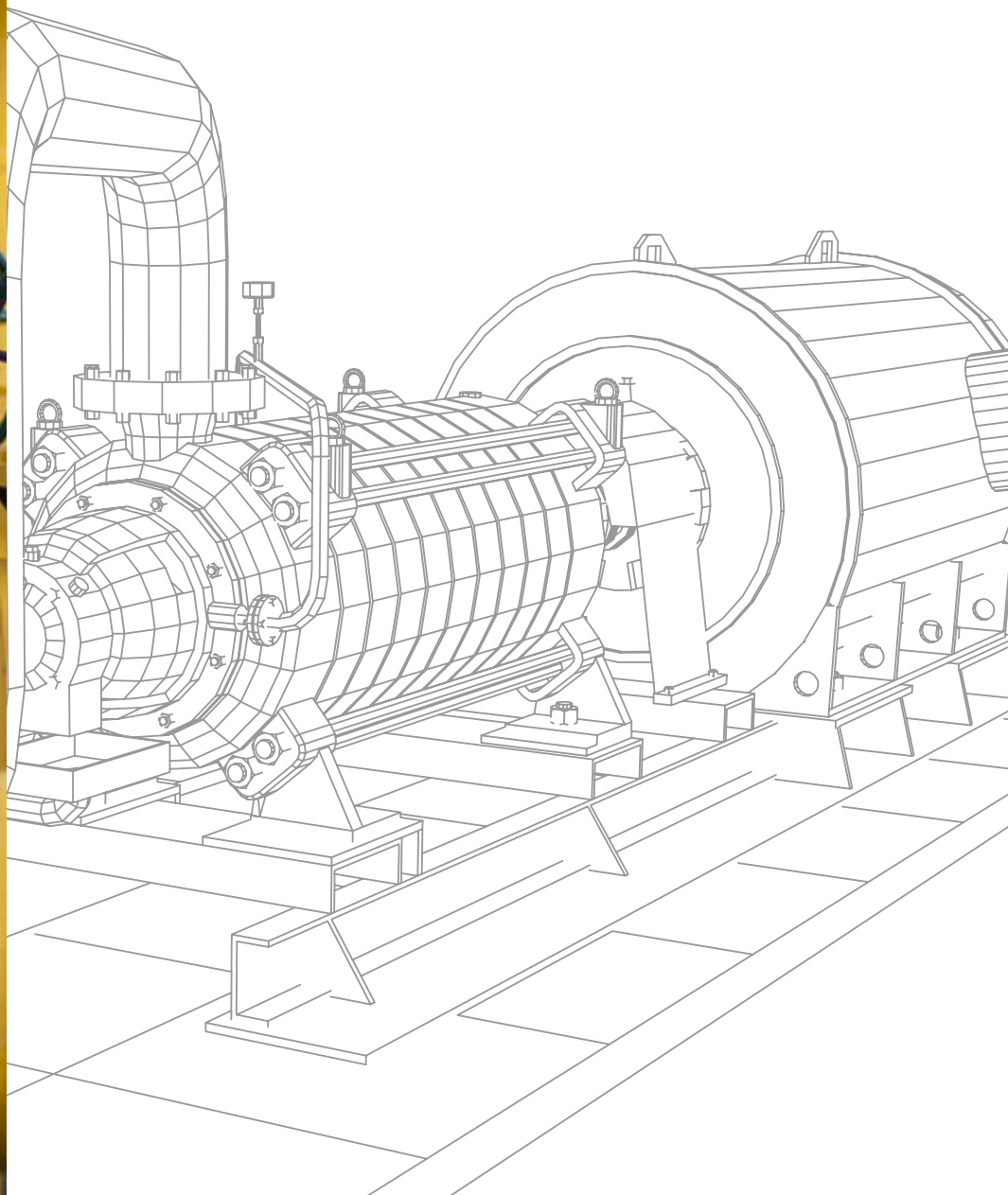
Melalui kolaborasi atau disebut juga kemitraan dalam kerangka TPB, diharapkan masa depan yang berkelanjutan dapat tercapai.





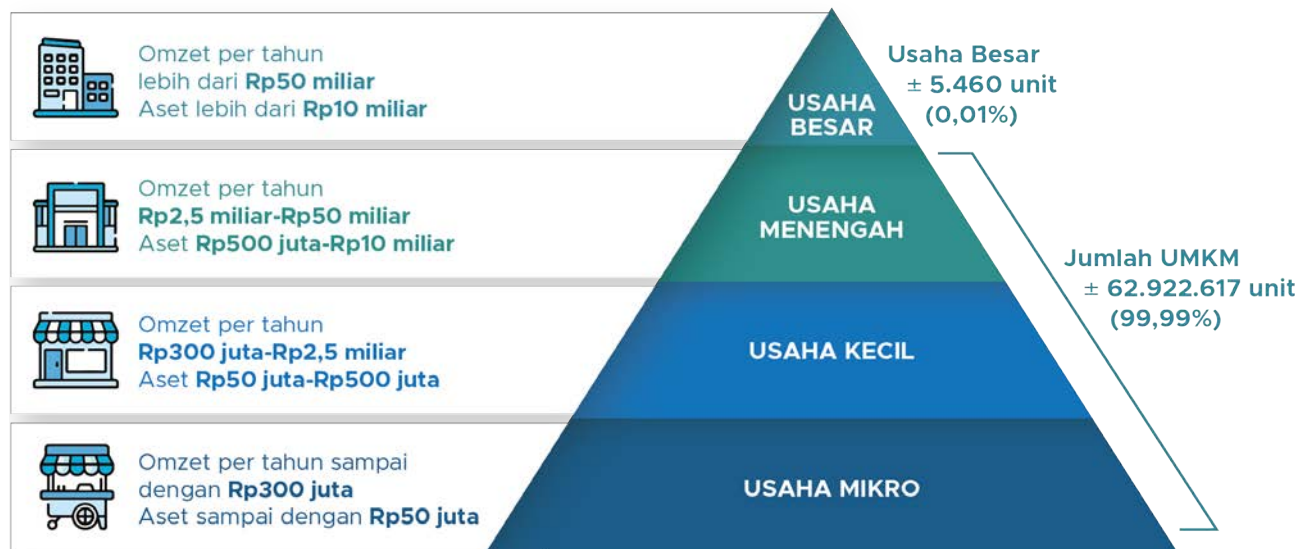
5

Program Pendanaan UMK



PROGRAM PENDANAAN UMK

Kondisi Eksisting UMKM di Indonesia



TOTAL 62.928.077 unit

Sumber: Kompas (2019)

PUMK merupakan program yang diselenggarakan oleh PGN untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, melalui peningkatan kapasitas, serta pemberian modal usaha lainnya yang terjangkau. Ketentuan penyaluran PUMK dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Milik warga negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, ik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Calon UMK Binaan telah berjalan minimal selama 6 (enam bulan); dan
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank.



Dana Program PUMK diberikan dalam bentuk:

1. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sumber dana berasal dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







6

Pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



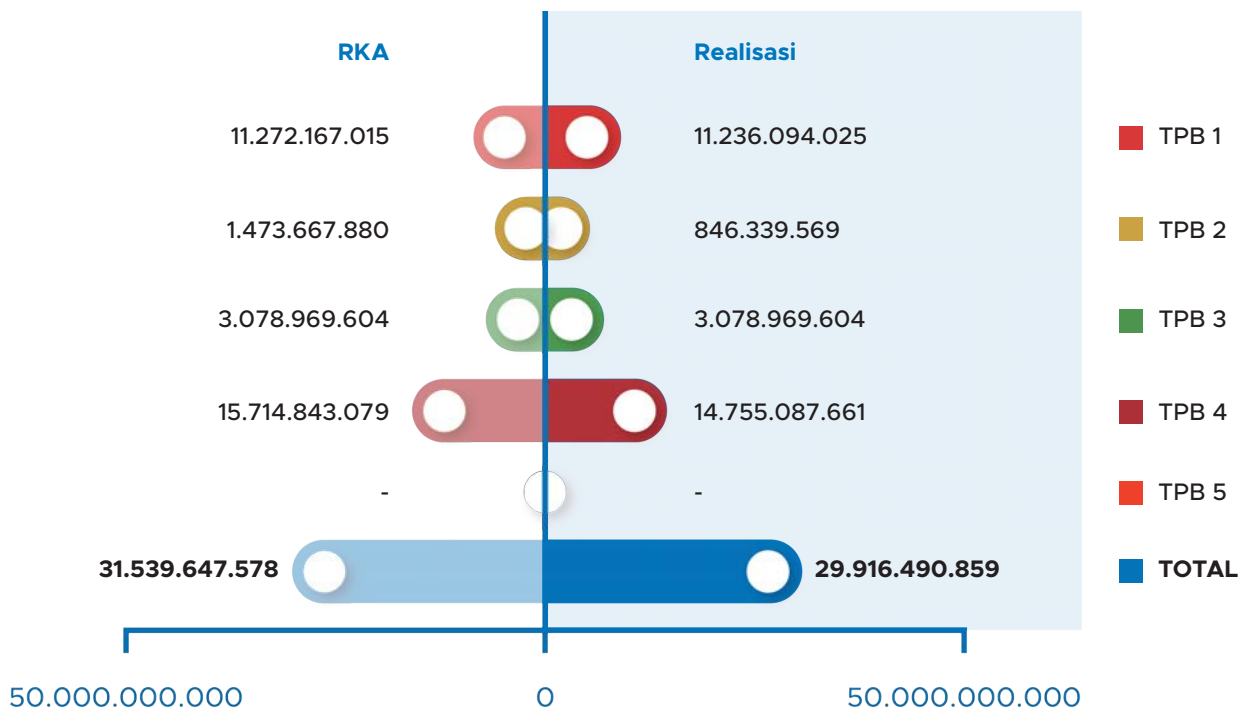
6.1 PILAR SOSIAL

PGN berkomitmen menjadi perusahaan dengan kepedulian sosial yang tinggi, dan sigap dalam merespon berbagai situasi yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pada beberapa program PGN bekerja sama dengan lebih kurang tiga lembaga organisasi kemanusiaan. Di bagian pilar sosial, PGN berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh aspek, termasuk pengentasan kemiskinan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Bagi PGN, peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat yang sejahtera dan berkualitas dapat mendukung pelaksanaan program.

Adapun poin-poin TPB yang berkaitan dengan program-program TJSL pada pilar sosial adalah:



Anggaran dan Realisasi Pilar Sosial Tahun 2022



Selama tahun 2022 PGN telah menyalurkan realisasi biaya sebesar **Rp29.916.490.859** (teralisasi 101,3 %) dalam **pilar sosial**.



Program-Program Tahun 2022

Dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan TPB, implementasi program TJSL merujuk standar ISO 26000 dan berpedoman pada prinsip *Creating Shared Value* (CSV), untuk memaksimalkan penciptaan nilai bersama agar memberikan manfaat menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan.

Survei dan Pengawasan (Monitoring) Program TJSL

89

lokasi penerima bantuan



Program Nuzulul Qur'an

450

yayasan



Program Santunan Anak Yatim (Penggerak Milenial Indonesia)

200

Anak Yatim



Program Ramadan

2

lokasi (Pontianak dan Kalimantan Barat)



Program Bantuan Sosial Purnakarya

1.069

purnakarya



Program Natal dan Tahun Baru

82

rumah ibadah



Program Idul Qurban

4

wilayah operasi penjualan

**28**

ekor sapi

**185**

ekor kambing

**1** TANPA KEMISKINAN

Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.

Proposal Insidental

3

proposal disetujui



Program Papua Muda Inspiratif (PMI) (Bantuan pengembangan pertanian jagung wilayah Manokwari, Papua Barat)

1

paket perlengkapan pupuk dan obat-obatan

**2** TANPA KELAPARAN

Mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta memprioritaskan pertanian berkelanjutan.



Program Distribusi Alat Kesehatan

98

purnakarya



Program Distribusi Alat Kesehatan (Penyediaan Generator Oksigen)

3

wilayah operasi
penjualan



Program Mudik

546

pemudik



Program Renovasi Masjid Al-Istiqomah

Program Penyediaan Mobil Ambulans (Serikat Guru)

1



Program Penyediaan Mobil Layanan Donor Darah (PMI)

1



3 KESEHATAN YANG BAIK
DAN KESEJAHTERAAN



Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.

Sosialisasi Program Sambungan Pipa Gas Rumah Tangga & Pelayanan Kesehatan Masyarakat

36.200

sambungan pipa
rumah tangga



Program Sertifikasi Operator Jargas/ Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri

90

peserta



Program Beasiswa Pendidikan Putra Putri TNI & Polri

46

Putra/i TNI Polri
di 3 lokasi



Program Pembangunan Wifi Corner di salah satu universitas

Program Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam Termasuk Wabah

4

wilayah operasi
penjualan



Program Pendidikan Anak Purnakarya dan Anumerta PGN

113

purnakarya &
anumerta



125

anak



Program Aspirasi Masyarakat berbasis pengajuan proposal - Klaster Pendidikan tahap 1 & 2

6

prioritas penyaluran
program TJSL



Program Pembangunan Kandang Ternak Kambing

100

kandang



Program Papua Muda Inspiratif (PMI) (Bantuan pelatihan batik, Jayapura)



1 unit alat
konveksi batik

4 PENDIDIKAN
BERKUALITAS



Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.



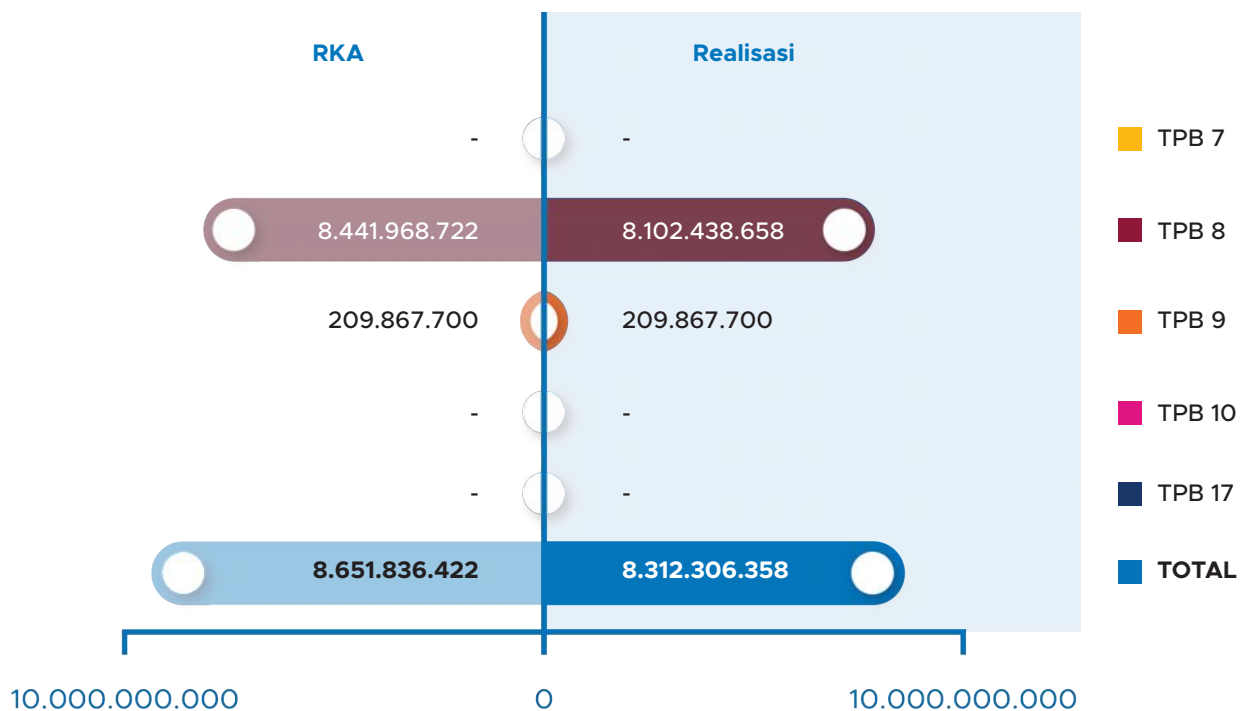
6.2 PILAR EKONOMI

Melalui berbagai program TJSL di pilar ekonomi, PGN berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. PGN berinisiatif untuk mendukung masyarakat dengan membantu memperoleh fasilitas yang menunjang produktivitas, sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri.

Program-program TJSL pada pilar ekonomi berfokus untuk mendorong pencapaian TPB berikut:



Anggaran dan Realisasi Pilar Ekonomi Tahun 2022



Selama tahun 2022 PGN telah menyalurkan realisasi biaya sebesar **Rp8.312.306.358** (teralisasi 109,8%) dalam **pilar ekonomi**.



Program-Program Tahun 2022

Dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PGN mengimplementasikan program TJSL dengan mengacu pada standar ISO 26000 dan prinsip *Creating Shared Value* (CSV).

Program Pendampingan Desa Energi Berdikari

4

Pendampingan
desa binaan



Program Desa Energi Berdikari di Bojonegara

1

dokumen
pemetaan sosial



Program Desa Energi Berdikari di Panaran

3

klaster
program



**Program Asistensi Teknis
dan Administrasi TJSL**
1 tahun pendampingan

Program Peningkatan Kapabilitas UMK



14

kali kegiatan
pengembangan UMK

Program Aspirasi Masyarakat berbasis pengajuan proposal - Klaster Pendidikan tahap 1 & 2

6

prioritas penyaluran
program TJSL



Program Bantuan bagi Peternak Kambing di Boyolali

40



dan paket bantuan 20
mesin dan peralatan

Program Pembagian Bantuan Sembako

5.000

paket sembako
di 2 wilayah



Asesmen Program TJSL & penghitungan dampak program menggunakan SROI

4

dokumen hasil
penghitungan dampak
dari 4 desa binaan



Kerja sama penggemukan Sapi di Sukabumi

50

ekor
sapi



Pasar Murah BUMN di Mojokerto

3.000

paket
sembako



Pameran UMK Dalam Negeri

2x

pameran



8

Pertumbuhan Ekonomi
dan Pekerjaan
yang Layak



Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.

Pengembangan lanjutan aplikasi SHARE



pekerjaan pengembangan
aplikasi

9

Industri, Inovasi,
dan Infrastruktur



Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.



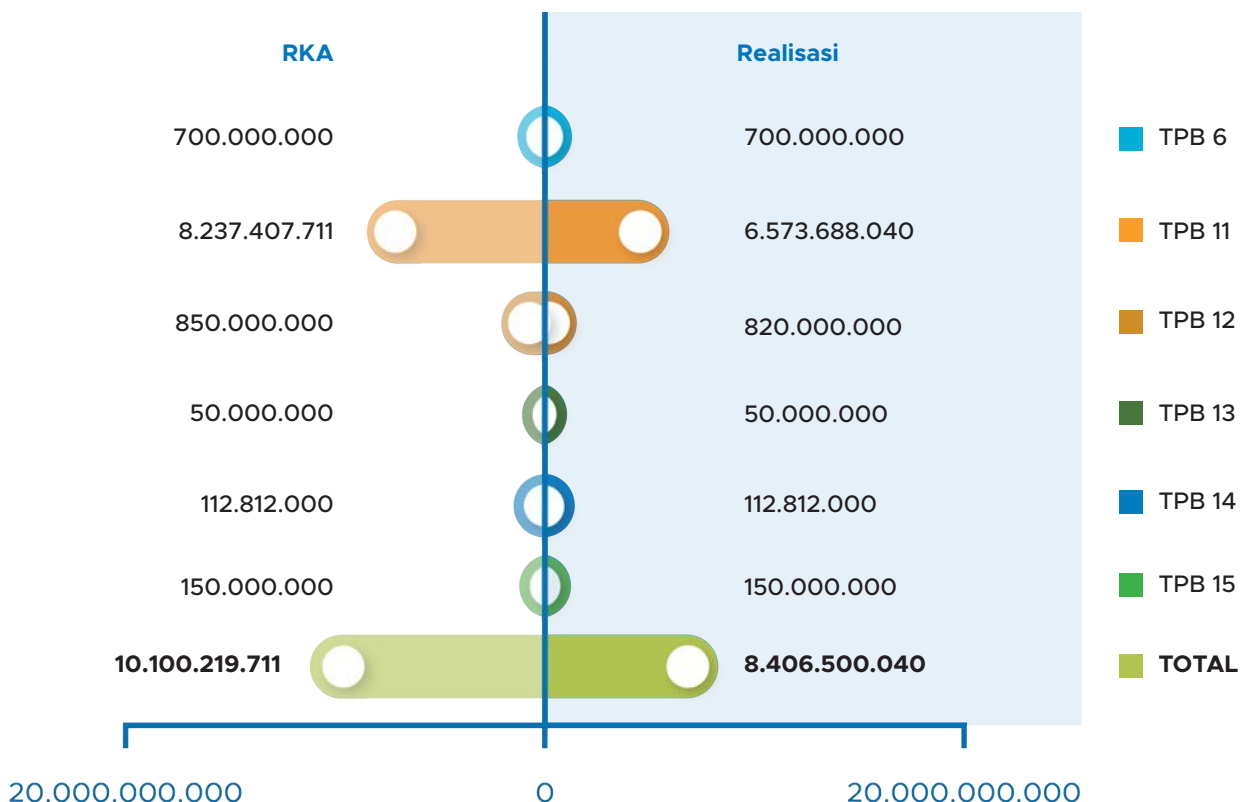
6.3 PILAR LINGKUNGAN

Dalam rangka mendukung perlindungan dan pelestarian alam, PGN berupaya menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, dengan mengadakan mitigasi risiko dan pengelolaan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk melindungi ekosistem darat dan laut, khususnya di wilayah tempat PGN beroperasi.

Adapun program-program TJSL pada pilar lingkungan berfokus untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya:



Anggaran dan Realisasi Pilar Lingkungan Tahun 2022



Selama tahun 2022 PGN telah menyalurkan realisasi biaya sebesar **Rp8.406.500.040** (terrealisasi 58,1%) dalam **pilar lingkungan**.



Untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan, PGN berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan sebagai implementasi kebijakan *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) berikut:



1

Mengutamakan aspek HSSE Perusahaan dalam menjalankan bisnis Perusahaan;

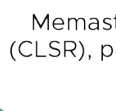
Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku di bidang HSSE termasuk peraturan internal, perundangan nasional & internasional, standar dan *best practices* pada seluruh kegiatan usaha dan operasional Perusahaan;

2



3

Mengurangi risiko serendah mungkin sesuai prinsip *As Low as Reasonably Practicable* (ALARP), termasuk melibatkan *major accident hazard* dengan memastikan kecukupan mitigasi yang dibutuhkan melalui penggunaan peralatan yang standar pengendalian proses secara aman, sumber daya manusia yang kompeten, serta memastikan sistem tanggap darurat dan krisis telah disiapkan sehingga keberlangsungan bisnis dapat terjaga;



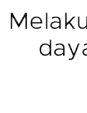
Memastikan pemahaman dan Implementasi *Corporate Life Saving Rules* (CLSR), pada pekerja dan mitra kerja serta melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang dinilai tidak aman;

4



5

Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja, serta mitra kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman, dan berwawasan lingkungan serta melibatkan pekerja dan mitra kerja dalam kegiatan komunikasi dan konsultasi;



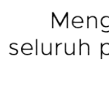
Melakukan upaya perlindungan lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, konservasi energi untuk mencapai efisiensi, pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta perlindungan keanekaragaman hayati;

6



7

Mengelola insiden melalui investigasi & belajar dari kejadian untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan secara transparan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan;



Mengikutsertakan, menjalin relasi & komunikasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang relevan termasuk masyarakat terkait aspek HSSE, untuk mendukung operasional Perusahaan yang berwawasan HSSE; dan

8



9

Mengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan, dan Pengelolaan Lingkungan serta Energi secara rutin guna perbaikan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepuasan Pelanggan.

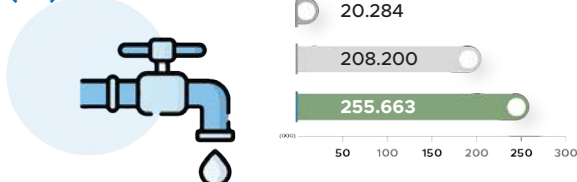
Berikut Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan standar **ISO 14001: 2015**



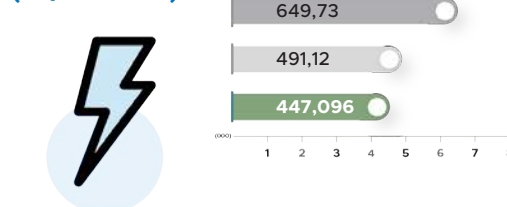
PGN secara berkala melakukan evaluasi kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, untuk memastikan dampak lingkungan dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dilakukan sesuai dengan hasil penetapan aspek lingkungan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkunga (AMDAL), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta rencana kerja dan sasaran pada tahun pelaporan. Untuk mengelola dampak lingkungan dari hasil operasional perusahaan, PGN melakukan berbagai upaya yang efisien dalam penggunaan air dan energi, pengurangan emisi, pengurangan limbah, efisiensi penggunaan kertas, pemanfaatan energi, dan berbagai program TJSI yang terkait dengan pilar lingkungan:

Dampak Pilar Lingkungan

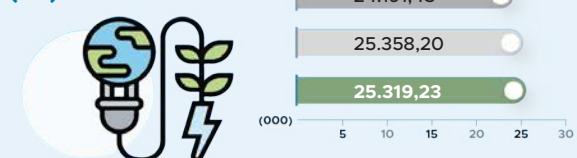
Konsumsi Air (m³)



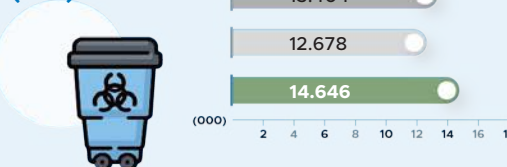
Intensitas Energi (GJ/MMSCFD)



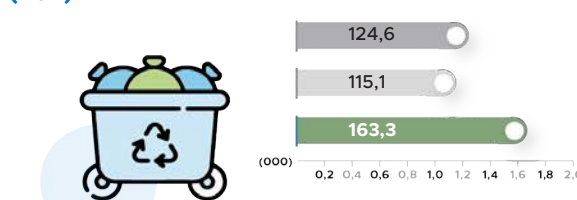
Penghematan Energi (GJ)



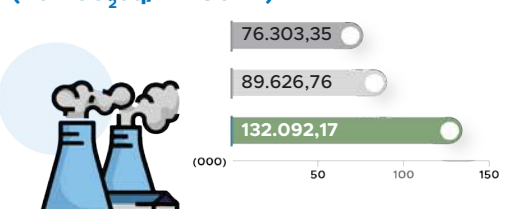
Limbah B3 (Ton)



Limbah Non B3 (Ton)



Pengurangan Emisi (Ton CO₂eq/MMSCFD)



■ 2022 ■ 2021 ■ 2020

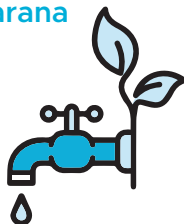


Program-Program Tahun 2022

Program Penyediaan Sarana Air Bersih

4

3 titik di Gunung Kidul
1 titik di Bali



Program Pembangunan Pompa Hidram (Kodam IX Udayana Denpasar - Bali)



1 unit pompa
hidram

6 AIR BERSIH
DAN SANITASI



Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Program Desa Energi Berdikari di Kalisogo (PROPER)

4

klaster
program



Program Aspirasi Masyarakat berbasis pengajuan proposal - Klaster Lingkungan tahap 1

6

prioritas penyaluran
program TJSL



Program Bantuan Pembangunan Kolam Renang (Kodam XIII/Merdeka - Tateli, Manado)



Program Pembangunan Masjid Istiqlal di Houston

1 kali kegiatan renovasi



Program Bantuan Renovasi Masjid Al Hukama Badan Diklat Kejaksaan RI

1 kali kegiatan renovasi



Program Bantuan Pengadaan Fasilitas Ruang Publik (Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII - Sleman)



Program Bantuan Pembangunan Masjid Jami Al-Ihsan Jakarta

11 KEBERLANJUTAN KOTA
DAN KOMUNITAS



Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.

Program Desa Energi Berdikari di Pagar Dewa (PROPER)

4

klaster
program



Program Desa Energi Berdikari di Dumai

1

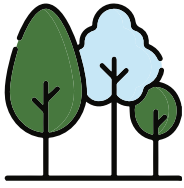
dokumen
pemetaan sosial



12 KONSUMSI DAN
PRODUKSI BERKELANGSUNG BARU



Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.



Program Penanaman Pohon di Wilayah Operasi

4

wilayah operasi penjualan



Bertindak cepat untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.



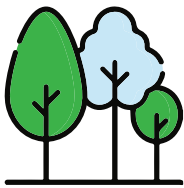
Program Penanaman Pohon *Mangrove* (*Employee Voluntary Program*)

1.000

pohon *mangrove*



Melestarikan dan menjaga sumber daya laut dan biota laut untuk pembangunan berkelanjutan.



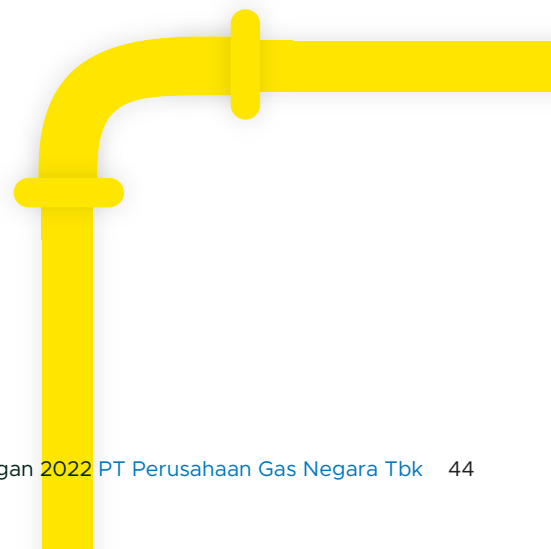
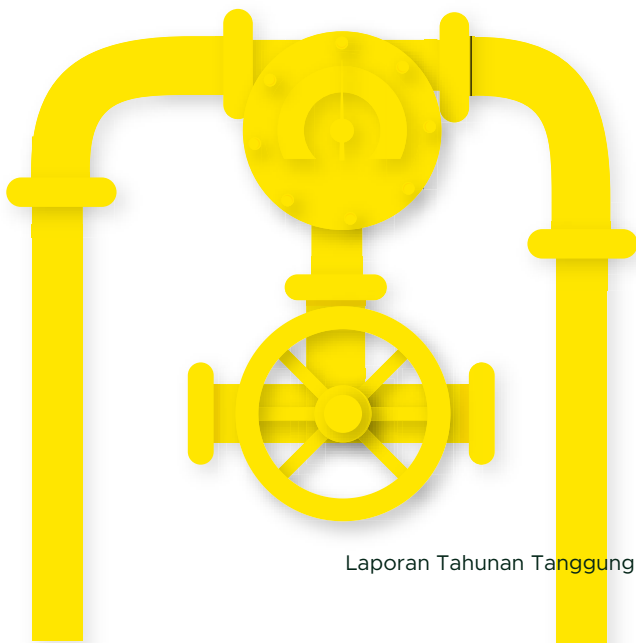
Kerjasama pengadaan pohon Sekda Semarang

180

pohon



Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat melalui pemanfaatan berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, mengurangi pembukaan dan pergantian lahan, memerangi deforestasi, meningkatkan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan penurunan keanekaragaman hayati.





6.4 PILAR HUKUM & TATA KELOLA

PGN fokus pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan yang dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara seimbang, dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip yang mendasari hukum dan pengelolaan perusahaan berdasarkan etika bisnis. Hal ini penting karena prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari operasional perusahaan.

Secara umum PGN telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap lini bisnisnya, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran dewan komisaris dan direksi. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengukuran dan evaluasi dalam penerapan GCG berdasarkan kriteria penilaian parameter BUMN (SK-16) yang dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil 99.004 (sangat baik), meningkat dari hasil evaluasi tahun sebelumnya sebesar 98,56.

Seluruh upaya ini dimaksudkan untuk berkontribusi dalam pencapaian TPB, khususnya:



Dalam aktivitas operasinya, PGN mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), berikut penjelasannya:



Dalam pengukuran dan evaluasi CGC, PGN menggunakan parameter internasional (PJOK 21/2015) yaitu *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Pada tahun ini PGN juga melakukan evaluasi tata kelola dengan metode terbaru yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yakni Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, dengan kualifikasi: terpenuhi.



KEBIJAKAN DAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



- *Board* Manual
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja
- Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi
- Pedoman *Whistleblowing System*
- Pedoman Manajemen Risiko
- Pedoman Piagam Audit Internal
- Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan
- Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

- Etika Perseroan dengan Pekerja
- Etika Perseroan dengan Pelanggan
- Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa
- Etika Perseroan dengan Kreditur
- Etika Perseroan dengan Pemerintah
- Etika Perseroan dengan Masyarakat
- Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
- Etika Perseroan dengan Pemasok Gas Bumi

PEDOMAN ETIKA USAHA



PEDOMAN ETIKA KERJA



- Komitmen Individu
- Kerjasama Antar Insan PGN
- Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
- Benturan Kepentingan
- Penerima Hadiah
- Pemberi Hadiah
- Perlindungan Aset PGN
- Mencatat Data dan Pelaporan
- Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan
- Aktifitas Politik
- Integritas Laporan Keuangan
- Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)
- Penggunaan Media Sosial

- Pakta Integritas
- Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi



ANTI KORUPSI

STANDAR DAN PRAKARSA INTERNASIONAL



- ISO 37001 Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- ISO 26000 Pedoman Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
- ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3
- ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
- ISO 27001:2018 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- ISO 31000:2018 Sistem Manajemen Risiko
- ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset Mekanisme Pengaduan



Upaya Penguatan Budaya Perusahaan

PGN juga mengimplementasikan *core value* AKHLAK BUMN sebagai budaya perusahaan melalui program-program sebagai berikut:



Ethics Ambassador

Program sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Etika Usaha & Etika Kerja di setiap satuan kerja/anak perusahaan/afiliasi.



Coffee Morning Briefing Online (C'Mon Bro)

Rapat koordinasi rutin masing-masing satuan kerja yang fokus pada program kerja dan upaya pencapaian target kinerja.



Cross Sharing

Berbagi pengetahuan yang menghadirkan narasumber dari satuan kerja lain di lingkungan Pertamina Group sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja.



Energi Baik BerAKHLAK

Kegiatan olahraga bersama untuk memperkuat semangat internalisasi nilai-nilai AKHLAK.



Sharing dan Coaching (SharChing)

Program berbagi pengetahuan dan program *coaching* yang dilakukan oleh sesama Perwira Sub-holding Gas.

PGN juga melakukan penguatan budaya perusahaan sebagai berikut:



Surat edaran anti pelecehan seksual di lingkungan Sub-holding Gas, untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual



Cross Talent Mobility, untuk penguatan kompetensi dan *melting culture*



Millennials Empowering, untuk penguatan kompetensi milenial dalam akselerasi program pengembangan pekerjaan kaum milenial



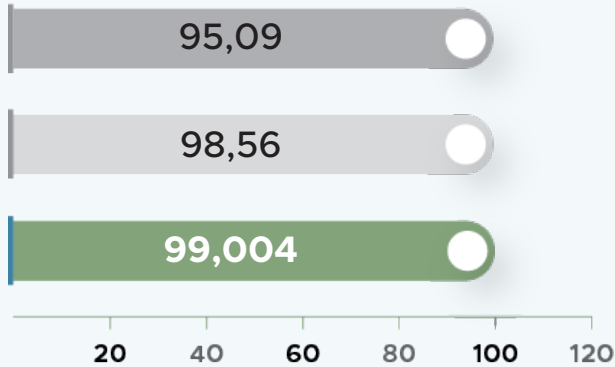
Employee Engagement Survey yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.



Hasil Penilaian Penerapan GCG

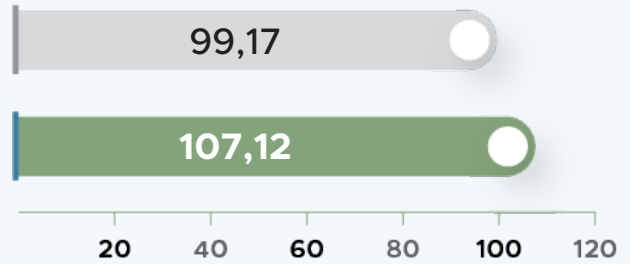
Berdasarkan parameter BUMN

BUMN



Berdasarkan ACGS

ACGS
ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD



Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kasus Korupsi



Nil

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Pembentukan Komite Keberlanjutan dan Tim *Environment, Social and Governance*

ESG

Anti Korupsi

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

ISO 37001:2016

Budaya Organisasi

Terdapat 6 nilai budaya yaitu

- Amanah
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif

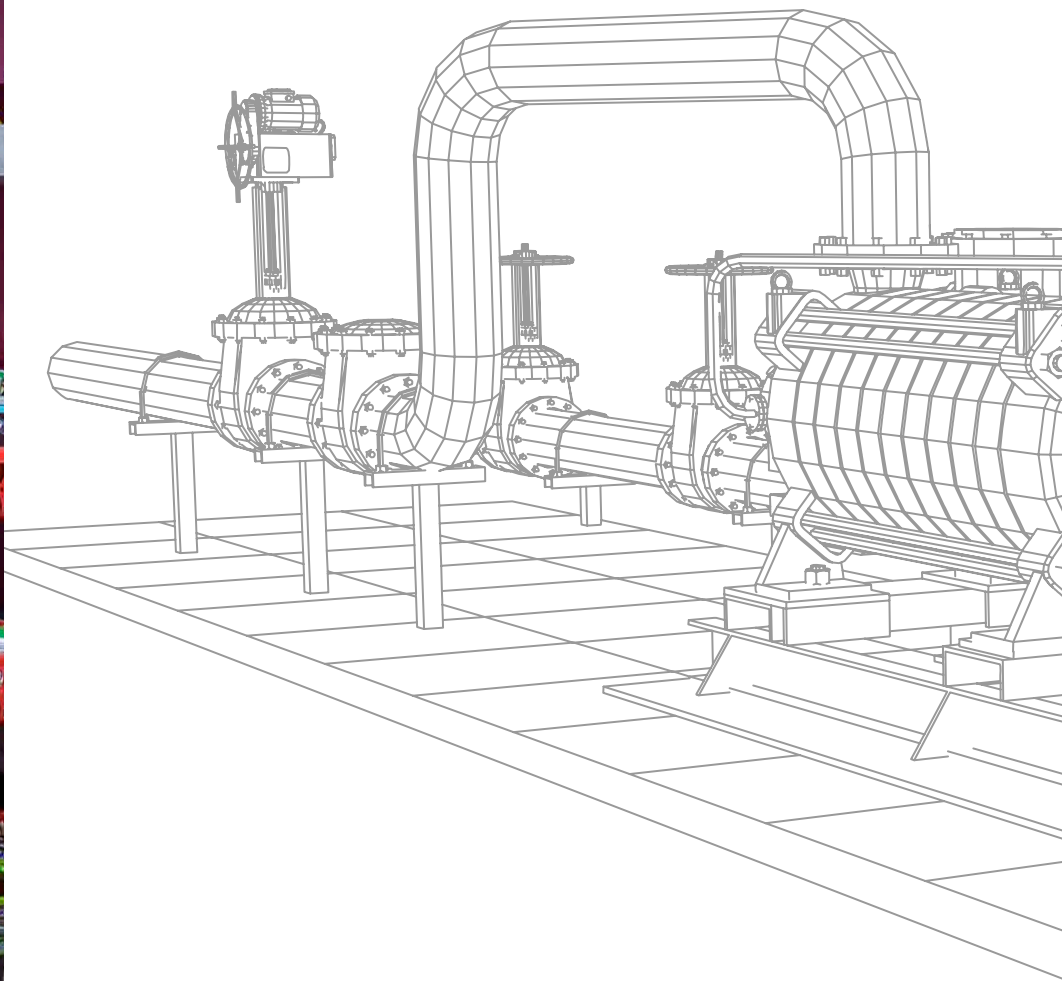
AKHLAK





7

Desa Binaan



DESA BINAAN

Dalam upaya menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar wilayah operasional, PGN merancang Program Desa Binaan secara komprehensif. Diawali dengan tahap pemetaan sosial, survei terhadap pemangku kepentingan diselenggarakan di wilayah sekitar stasiun gas (*offtake station*) PGN. Kemudian program diimplementasikan, disertai dengan pengawasan dan evaluasi, lalu program diserahkan kepada kelompok masyarakat yang terlibat. Diharapkan melalui program ini keberadaan PGN mendapat dukungan penuh dari warga, mengingat stasiun gas merupakan objek vital nasional yang memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan pasokan gas.

Program Desa Binaan bertujuan mendorong kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan institusi/lembaga kemasyarakatan. Setiap desa yang tercakup dalam program ini didorong untuk mendirikan BUMDes maupun kelembagaan lain dengan berbagai unit usaha masyarakat yang ada di bawahnya. Saat ini PGN memiliki tujuh desa binaan, yaitu:

1. **BUMDes Dewa Sejahtera:** Stasiun Gas Pagardewa, Desa Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan.
2. **Kelompok Perempuan Kreatif Mandiri:** Stasiun Gas Panaran, Desa Tembesi Tower, Pulau Lance, Batam.
3. **BUMDes Sriminosari:** Stasiun Labuhan Maringgai, Desa Sriminosari, Kec. Labuhan Maringgai, Lampung.
4. **BUMDes Sabar Subur:** Stasiun Gas Bojonegara, Desa Teluk Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten
5. **Balkondes Karangrejo:** Desa Karangrejo, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Jawa Tengah
6. **Desa Binaan Kelurahan Harjamukti:** Stasiun Gas SOR II, Kelurahan Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
7. **Desa Kalisogo:** Stasiun Gas SOR III, Desa Tambak Kalisogo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Desa Tambak Kalisogo saat ini masih dalam proses pemetaan sosial, sedangkan di enam desa lainnya program telah berjalan.

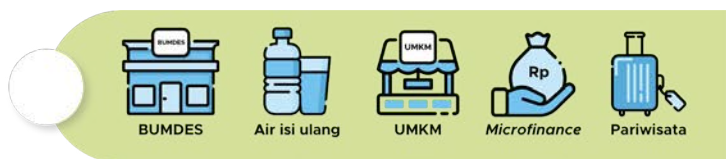
BUMDes Dewa Sejahtera



Kelompok Perempuan Kreatif Mandiri



BUMDes Sriminosari



BUMDes Sabar Subur



Balkondes Karangrejo



Desa Binaan Kelurahan Harjamukti



PENGUKURAN DAMPAK PROGRAM

WILAYAH	KEGIATAN	IKM						SROI
		INDEKS KEPENTINGAN	KATEGORI	STATUS	INDEKS KINERJA	KATEGORI	STATUS	
Panaran, Batam	Bank Sampah di Tanjung Gundap	3,951	A	Sangat Penting	3,785	A	Sangat Puas	1.77 UMKM 0.59 Bank Sampah
	Koperasi Mitra Karya Tembesi	3,947	A	Sangat Penting	3,924	A	Sangat Puas	
	Bank Sampah Walidah Tembesi Tower	3,861	A	Sangat Penting	3,618	A	Sangat Puas	
	Posyandu Balita Tembesi Tower	3,618	A	Sangat Penting	3,632	A	Sangat Puas	
Pagardewa, Sumatera Selatan	Bank Sampah	3,321	A	Sangat Penting	3,632	A	Sangat Puas	3.60
	Koperasi Tani Padetra Artomulyo	3,690	A	Sangat Penting	3,632	A	Sangat Puas	
	Pelatihan UMKM	3,267	A	Sangat Penting	3,785	A	Sangat Puas	
	Air Minum Bersih	3,571	A	Sangat Penting	3,618	A	Sangat Puas	
	Koperasi Simpan Pinjam	3,861	A	Sangat Penting	3,618	A	Sangat Puas	
	Pemeriksaan Kesehatan & Pemberian Alat Cek Kesehatan	3,454	A	Sangat Penting	6,632	A	Sangat Puas	
Cimanggis, Depok	Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Stunting	3,669	A	Sangat Penting	3,785	A	Sangat Puas	1.07
Balkondes, Jawa Tengah	Desa Binaan	3,951	A	Sangat Penting	3,785	A	Sangat Puas	1.17
Teluk Terate, Serang	Desa Binaan	3,947	A	Sangat Penting	3,924	A	Sangat Puas	2.26
Sriminosari, Lampung Timur	Desa Binaan	3,861	A	Sangat Penting	3,618	A	Sangat Puas	1.85

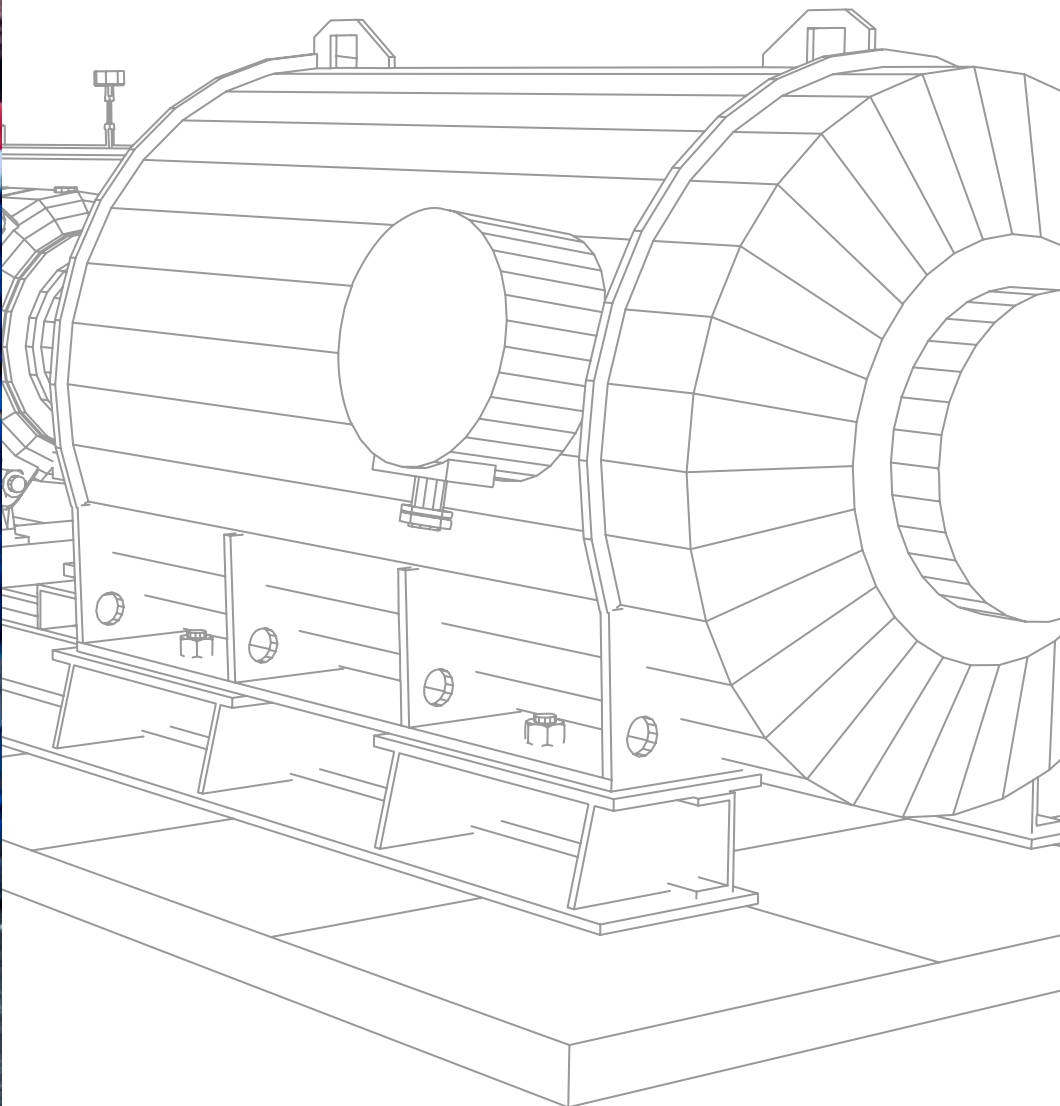






8

Lain-lain



Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Laporan Keuangan
31 Desember 2022

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar isi

Surat Pernyataan

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan.....

Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan Arus Kas.....

Catatan atas Laporan Keuangan

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
DAN KEPALA DIVISI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rachmat Utama
Alamat Kantor : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140, Indonesia
Telepon : 021 - 6334838
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
2. Nama : Anak Agung Raka Haryana
Alamat Kantor : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140, Indonesia
Telepon : 021 - 6334838
Jabatan : Kepala Divisi *Corporate Social Responsibility*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Perusahaan Gas Negara Tbk. tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan PUMK PT Perusahaan Gas Negara Tbk. telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PUMK PT Perusahaan Gas Negara Tbk. telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan PUMK PT Perusahaan Gas Negara Tbk. tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PUMK PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2023



Rachmat Utama
Sekretaris Perusahaan

Anak Agung Raka Haryana
Kepala Divisi *Corporate Social Responsibility*

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, dan
Pengurus Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PUMK Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal lain

Laporan keuangan PUMK Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya No. 00238/2.1025/AU.2/02/1130-1/1/II/2022 tanggal 28 Februari 2022, menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan PUMK tersebut.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Irwan Haswir
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726

31 Maret 2023



00576

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	12.617.291.563	12.313.542.900
Piutang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") penyalur - bersih	5	72.215.650	-
Piutang lain-lain, bersih	7	-	-
Jumlah aset lancar		<u>12.689.507.213</u>	<u>12.313.542.900</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang bermasalah pinjaman mitra binaan, bersih	6	22,075,000	-
Piutang bermasalah BUMN penyalur, bersih	8	-	-
Jumlah aset tidak lancar		-	-
JUMLAH ASET		<u>12.711.582.213</u>	<u>12.313.542.900</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kelebihan pembayaran angsuran		<u>4.125.486</u>	<u>4.125.486</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>4.125.486</u>	<u>4.125.486</u>
ASET NETO			
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya		12.707.456.727	12.309.417.414
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya		-	-
JUMLAH ASET NETO		<u>12.707.456.727</u>	<u>12.309.417.414</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>12.711.582.213</u>	<u>12.313.542.900</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa giro	9	238.075.828	230.882.577
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		<u>1.420.000</u>	<u>13.905.000</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>239.495.828</u>	<u>244.787.577</u>
PEMULIHAN/(BEBAN)			
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	11	206.158.650	114.445.660
Beban administrasi dan umum	10	<u>(47.615.165)</u>	<u>(46.176.516)</u>
JUMLAH PEMULIHAN, NETO		<u>158.543.485</u>	<u>68.269.144</u>
SURPLUS		<u>398.039.313</u>	<u>313.056.721</u>
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		<u>398.039.313</u>	<u>313.056.721</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	12.309.417.414	11.996.360.693
Surplus	<u>398.039.313</u>	<u>313.056.721</u>
Saldo akhir	12.707.456.727	12.309.417.414
Penghasilan komprehensif lain	<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH	<u>12.707.456.727</u>	<u>12.309.417.414</u>
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET NETO	<u>12.707.456.727</u>	<u>12.309.417.414</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pengembalian pinjaman piutang bermasalah mitra binaan	61.868.000	78.445.660
Pengembalian pinjaman piutang bermasalah BUMN penyalur	50.000.000	36.000.000
Pendapatan jasa giro	238.075.828	230.882.577
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	1.420.000	13.905.000
Beban administrasi dan umum	<u>(47.615.165)</u>	<u>(46.176.516)</u>
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	<u>303.748.663</u>	<u>313.056.721</u>
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	303.748.663	313.056.721
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	<u>12.313.542.900</u>	<u>12.000.486.179</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>12.617.291.563</u>	<u>12.313.542.900</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
("PUMK")**

a. Pendirian dan informasi umum

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("PGN") merupakan entitas anak PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang transmisi dan niaga gas bumi di Indonesia dan berkomitmen untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dimana salah satu bagian dari Program TJSL adalah Program PUMK. PGN membentuk Divisi *Corporate Social Responsibility* ("CSR") yang fungsi utamanya adalah mengelola TJSL, berdasarkan:

- (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Peraturan Menteri Negara ("Meneg") BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 sebagai pengganti Surat Keputusan ("SK") Meneg BUMN KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 sebagai pengganti SK Menteri Keuangan No. 316/KMK/016/1994 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba BUMN, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri ("Permen") BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, dan Permen BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017.
- (3) Surat Edaran ("SE") Meneg BUMN No. 21/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan BUMN.
- (4) SE Meneg BUMN No. 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- (6) SK Direksi PGN No. 006100.K/OT.00/UT/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi President Director's Office, Strategy and Business Development Directorate and Human Capital and General Services Directorate PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dan Surat Penugasan Division Head, Human Capital Management.
- (7) SK Direksi PGN No. 0017500.K/OT.00/DPO/2016 tanggal 1 Desember 2016 merubah SK Direksi PGN Nomor 006100.K/OT00/UT/2015 tentang Struktur Organisasi Finance Directorate PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
- (8) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (9) Keputusan Direksi Nomor 035400.K/OT.00/PDO/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Bilahan Struktur Organisasi Dasar (BOD-1) Subholding/Business Group Gas.
- (10) SK Direksi PGN No. 035500.K/OT.00/PDO/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi PGN, dan Struktur Organisasi Divisi CSR.
- (11) Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.
- (12) SK Direksi PGN No. 009201.K/OT.00/PDO/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Struktur Organisasi PGN.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
("PUMK") (lanjutan)**

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

- (13) Permen BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-05/MBU/09/2022.
- (14) SE Meneg BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 Perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").
- (15) SE Meneg BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.

b. Kegiatan utama

Program PUMK merupakan program yang diselenggarakan oleh PGN untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2. Milik Warga Negara Indonesia;
- 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- 5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- 6. Usaha calon UMK Binaan telah berjalan minimal selama 6 (enam) bulan; dan
- 7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank.

Dana Program PUMK diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

c. Sumber dana

Sumber dana Program PUMK berasal dari:

- 1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
- 2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- 3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
("PUMK") (lanjutan)**

c. Sumber dana (lanjutan)

4. Saldo dana Program kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015 dan/atau;
5. Jasa administrasi pinjaman, margin, bagi hasil, bunga deposito, dan/atau jasa giro dari Program kemitraan.

d. Susunan pengurus

Pengurus Program PUMK adalah Divisi CSR PGN. Kantor Divisi CSR beralamat di Gedung Graha PGAS Lantai 6, Jl. Kyai H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat 11140.

Pengurus pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Direktur Pembina TJSL dan Direktur Utama	: M. Haryo Yuniarto
Sekretaris Perusahaan	: Rachmat Utama
Kepala Divisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	: Anak Agung Raka Haryana
Kepala Departemen Operasional	: Sigit Tri Hartanto Sukamto
Kepala Departemen Perencanaan dan Pengawasan	: Dodo Darsono

Pengurus pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Direktur Pembina TJSL dan Direktur Utama	: M. Haryo Yuniarto
Sekretaris Perusahaan	: Rachmat Utama
Kepala Divisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	: Anak Agung Raka Haryana
Kepala Departemen Operasional	: Sigit Tri Hartanto Sukamto
Kepala Departemen Perencanaan dan Pengawasan	: Tubagus Nurcholis

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Program PUMK PGN telah disusun dan diselesaikan oleh Pengurus pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan keuangan disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, SE Meneg BUMN No. S-101/DSI.MBU.B/11/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan PUMK, SE Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 ("SE-02/2012") tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi TJSL Badan Usaha Milik Negara dan SE Meneg BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 ("SE-01/2012") tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi TJSL Revisi 2012. SE-01/2012 dan SE-02/2012 tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang dilaporkan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang dari BUMN penyalur

Piutang dari BUMN penyalur merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar BUMN. Piutang dari BUMN penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana kepada BUMN penyalur serta dicatat sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada BUMN penyalur, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

d. Piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh TJSL kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Piutang lain-lain merupakan piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo dan piutang pengembalian sisa dana BUMN peduli dari BUMN lain.

Piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tidak lancar sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

Penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penggolongan kualitas pinjaman di atas memperhatikan ketentuan dalam SE-02/2012.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat keterlambatan data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual. Perhitungan ini telah memperhitungkan nilai terpulihkan dari arus kas yang akan diterima TJSL di masa depan selama periode pembayaran.

f. Piutang pinjaman bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah merupakan piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya melalui penjadwalan ulang dan rekondisi, namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah. Pada tahun 2017, Pengurus secara formal melalui Nota Dinas No. 101500.ND/HM.05.03/CSR/2017 dari Kepala Divisi CSR kepada Direktur Pembina TJSL dan Direktur Keuangan BUMN Pembina, mendefinisikan piutang pinjaman bermasalah sebagai piutang Program Kemitraan dengan kriteria sebagai berikut:

- tidak terdapat pengembalian piutang yang substansial meskipun telah dilakukan upaya pemulihan pinjaman dan konfirmasi piutang selama 3 tahun; dan/atau
- pinjaman telah berusia lebih dari 10 tahun.

Alokasi pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang piutang pinjaman bermasalah dan disajikan sebagai aset tidak lancar.

g. Kelebihan pembayaran angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan. Kelebihan pembayaran angsuran diakui sebagai liabilitas pada saat setoran tersebut diterima oleh TJSL. Kelebihan pembayaran angsuran diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan pembayaran angsuran. Kelebihan pembayaran angsuran disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek.

h. Aset bersih

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

i. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- i. Jumlah pendapatan diukur secara andal;
- ii. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke dalam unit TJSL; dan
- iii. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan jasa administrasi diakui hanya untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang lancar, dan diukur berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak dengan ketentuan manfaat ekonomis atas jasa administrasi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke dalam TJSL.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

TJSL telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan TJSL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan TJSL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas TJSL;
- memiliki pengaruh signifikan atas TJSL; atau
- merupakan personil manajemen kunci TJSL atau entitas induk TJSL.

Suatu entitas berelasi dengan TJSL jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- TJSL dengan BUMN;
- TJSL dengan TJSL lain dimana kedua TJSL tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- TJSL atau individu yang mengendalikan TJSL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh TJSL pelapor.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dan piutang lain-lain, Pengurus mempertimbangkan umur piutang dan melakukan perhitungan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yaitu umur piutang. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual dengan memperhitungkan estimasi nilai yang dapat ditagih berdasarkan arus kas yang akan diterima TJSL di masa depan selama periode pembayaran.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	12.617.291.563	12.313.542.900
Jumlah kas dan setara kas	<u>12.617.291.563</u>	<u>12.313.542.900</u>

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PIUTANG BUMN PENYALUR

Piutang BUMN penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada TJSL BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar TJSL sebagaimana diinstruksikan oleh Menteri BUMN. Piutang dari BUMN penyalur terdiri atas:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PT Perkebunan Nusantara IX ("PTPN IX")	7.245.215.650	7.245.215.650
Jumlah sebelum penyisihan penurunan nilai piutang	7.245.215.650	7.245.215.650
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang dari BUMN penyalur	<u>(7.173.000.000)</u>	<u>(7.245.215.650)</u>
Jumlah piutang BUMN penyalur, bersih	<u>72.215.650</u>	<u>-</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN penyalur adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	7.245.215.650	7.245.215.650
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(72.215.650)</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u>7.173.000.000</u>	<u>7.245.215.650</u>

Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai diakui pada pendapatan lain-lain dalam laporan aktivitas dan untuk kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai diakui pada beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman.

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pengurus melakukan penjadwalan kembali atas piutang PTPN IX berdasarkan permintaan dari BUMN penyalur. Berikut ini adalah uraian perjanjian penjadwalan kembali yang telah disepakati TJSL dengan PTPN IX.

Perjanjian penjadwalan kembali piutang dengan PTPN IX

TJSL PGN melakukan kerja sama penyaluran Program PUMK dengan PTPN IX melalui kontrak kerja sama No. 007600.K/HM.05/KEU2014. Pada tanggal 28 Desember 2015, TJSL PGN dan PTPN IX melakukan penjadwalan kembali sebesar Rp25.000.000.000 dengan biaya administrasi senilai Rp3.914.984.479. Pelunasan dilakukan bertahap mulai periode 2015 sampai 2018.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, PTPN IX mengajukan permohonan atas penghapusan jasa administrasi kepada PGN. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2022, PGN memberikan konfirmasi balasan bahwa atas permohonan penghapusan jasa administrasi tersebut, PGN akan mempertimbangkan dengan melakukan tindak lanjut kajian berdasarkan Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 yakni penghapusan jasa administrasi dapat dihapuskan sebagai bentuk penyesuaian pinjaman (*reconditioning*) apabila terdapat itikad baik maupun kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang dari PTPN IX telah jatuh tempo seluruhnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan ini, belum ada kesepakatan antara PGN dan PTPN IX untuk melakukan penjadwalan kembali pembayaran piutang tersebut. Oleh karena itu, PGN memutuskan untuk melakukan pencadangan seluruhnya atas piutang PTPN IX.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PIUTANG BUMN PENYALUR (lanjutan)

Perjanjian penjadwalan kembali piutang dengan PTPN IX (lanjutan)

Per 31 Desember 2022, terdapat pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai sejumlah Rp72.215.650, yang terkait dengan penerimaan piutang dari PTPN IX pada bulan Februari 2023, sehingga saldo penyisihan kerugian penurunan nilai piutang dari BUMN Penyalur menjadi sebesar Rp7.173.000.000 (lihat Catatan 13).

6. PIUTANG BERMASALAH PINJAMAN MITRA BINAAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang pinjaman dari mitra binaan	53.963.720.636	54.025.588.636
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(53.941.645.636)</u>	<u>(54.025.588.636)</u>
Piutang bermasalah pinjaman dari mitra binaan, bersih	<u>22.075.000</u>	<u>-</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	54.025.588.636	54.104.034.296
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(83.943.000)</u>	<u>(78.445.660)</u>
Saldo akhir	<u>53.941.645.636</u>	<u>54.025.588.636</u>

Analisis saldo piutang bermasalah pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sektor perdagangan	16.819.575.299	16.837.075.299
Sektor jasa	13.765.950.330	13.765.950.330
Sektor industri	13.697.029.591	13.739.397.591
Sektor peternakan	5.273.673.013	5.275.673.013
Sektor pertanian	1.919.055.043	1.919.055.043
Sektor perikanan	903.361.334	903.361.334
Sektor perkebunan	215.436.416	215.436.416
Sektor lain	<u>1.369.639.610</u>	<u>1.369.639.610</u>
Jumlah piutang bermasalah pinjaman mitra binaan	53.963.720.636	54.025.588.636
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(53.941.645.636)</u>	<u>(54.025.588.636)</u>
Piutang bermasalah pinjaman mitra binaan, bersih	<u>22.075.000</u>	<u>-</u>

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. PIUTANG BERMASALAH PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

Analisis saldo piutang bermasalah pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Jawa Barat	14.874.661.157	14.877.661.157
DKI Jakarta	8.638.750.944	8.660.830.944
Jawa Tengah	8.127.305.638	8.127.305.638
Sumatera Selatan	5.608.203.395	5.608.203.395
Jawa Timur	4.767.076.057	4.768.576.057
Sumatera Utara	2.598.679.733	2.612.519.733
Yogyakarta	2.532.747.539	2.554.195.539
Jambi	1.788.690.304	1.788.690.304
Lampung	1.356.202.000	1.356.202.000
Banten	960.430.283	960.430.283
Riau	953.780.717	953.780.717
Sulawesi Selatan	722.162.869	722.162.869
Sumatera Barat	481.320.000	481.320.000
Bali	229.260.000	229.260.000
Papua	193.500.000	193.500.000
Sulawesi Barat	65.950.000	65.950.000
Aceh	45.000.000	45.000.000
Kepulauan Bangka Belitung	20.000.000	20.000.000
Jumlah piutang bermasalah pinjaman mitra binaan	53.963.720.636	54.025.588.636
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53.941.645.636)	(54.025.588.636)
Piutang bermasalah pinjaman mitra binaan, bersih	<u>22.075.000</u>	<u>-</u>

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri atas piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo.

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang jasa administrasi	-	689.691.467
Dikurangi dengan:		
Penghapusan piutang jasa administrasi	-	(689.691.467)
Piutang pinjaman bermasalah, bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. PIUTANG BERMASALAH BUMN PENYALUR

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PT Sang Hyang Seri (Persero) ("SHS")	73.665.000.000	73.715.000.000
PT Pertani (Persero) ("Pertani")	<u>36.987.000.000</u>	<u>36.987.000.000</u>
	110.652.000.000	110.702.000.000
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(110.652.000.000)</u>	<u>(110.702.000.000)</u>
Piutang pinjaman bermasalah, bersih	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Mutasi piutang bermasalah selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	110.702.000.000	110.738.000.000
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(50.000.000)</u>	<u>(36.000.000)</u>
Saldo akhir	<u><u>110.652.000.000</u></u>	<u><u>110.702.000.000</u></u>

Pinjaman kepada SHS

TJSL memberikan pinjaman kepada SHS sejumlah Rp80.000.000.000 pada tahun 2012 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi ("GP3K"). Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, PGN menyetujui permohonan SHS untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman (*rescheduling*) sampai dengan tahun 2016.

Pada bulan Februari dan Desember 2022, SHS melakukan pembayaran angsuran masing-masing sebesar Rp25.000.000 sehingga PGN melakukan pemulihan penyisihan kerugian dengan jumlah yang sama. Saldo piutang pinjaman kepada SHS pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena TJSL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih.

Pinjaman kepada Pertani

Pada tahun 2012, TJSL memberikan pinjaman kepada Pertani sejumlah Rp77.000.000.000 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada GP3K. Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, TJSL menyetujui permohonan Pertani untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan April 2014, kemudian menyetujui rekondisi pada tanggal 30 Juni 2014. Pada tanggal 12 September 2021 dan 17 September 2021 Pertani melakukan penyetoran angsuran masing-masing senilai Rp20.000.000 dan Rp16.000.000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021, Pertani dinyatakan bubar dan melebur dengan PT Sang Hyang Seri. TJSL masih berpegang pada kontrak dasar yaitu dengan Pertani.

Saldo piutang pinjaman kepada Pertani pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena TJSL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

9. PENDAPATAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Jasa giro	238.075.828	230.882.577
Jasa administrasi pinjaman	<u>1.420.000</u>	<u>13.905.000</u>
Jumlah	<u>239.495.828</u>	<u>244.787.577</u>

10. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban Pajak Final PPh 4(2)	<u>47.615.165</u>	<u>46.176.516</u>
Jumlah	<u>47.615.165</u>	<u>46.176.516</u>

11. PEMULIHAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG PINJAMAN

Rincian atas beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pemulihan kerugian penurunan nilai - piutang bermasalah BUMN penyalur (Catatan 8)	50.000.000	36.000.000
Pemulihan kerugian penurunan nilai - piutang bermasalah pinjaman mitra binaan (Catatan 6)	83.943.000	78.445.660
Pemulihan penyisihan penurunan nilai - BUMN penyalur (Catatan 5)	<u>72.215.650</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>206.158.650</u>	<u>114.445.660</u>

12. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

Selama tahun 2022 dan 2021, TJSL melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak dan sifat dari transaksi-transaksi pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Sifat hubungan</u>	<u>Transaksi</u>
BRI	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Penempatan dana pada rekening bank
PTPN IX, SHS, Pertani	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Kerja sama penyaluran dana Program Kemitraan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

12. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pengembalian piutang pinjaman dari BUMN penyalur dan piutang bermasalah		
Pertani	-	36.000.000
SHS	<u>50.000.000</u>	<u>-</u>
	<u>50.000.000</u>	<u>36.000.000</u>
Pendapatan jasa giro		
BRI	<u>238.075.828</u>	<u>230.882.577</u>
	<u>238.075.828</u>	<u>230.882.577</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aset		
Kas dan setara kas (Catatan 4)	12.617.291.563	12.313.542.900
Piutang bermasalah* (Catatan 8)	110.652.000.000	110.702.000.000
Piutang BUMN penyalur* (Catatan 5)	<u>7.245.215.650</u>	<u>7.245.215.650</u>
	<u>130.514.507.213</u>	<u>130.260.758.550</u>

*) Saldo sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

13. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 6 Februari 2023, PGN menandatangani Amandemen III Perjanjian Kerja Sama dengan PTPN IX No. 009400.AMD/HM.05.01/COS/2023 terkait penjadwalan kembali dan pengkondisian kembali perjanjian kerja sama antara PGN dengan PTPN IX tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dalam Bentuk Penyaluran Pinjaman Tebu Rakyat Masa Tanam 2014 - 2015. Berdasarkan amandemen ini, disepakati pengembalian pinjaman sebesar Rp72.215.650 pada Februari 2023.

14. WABAH COVID-19

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, penurunan ekonomi akibat wabah penyakit COVID-19 masih berdampak kepada kondisi keuangan mitra binaan, karena masih rendahnya daya beli masyarakat akan permintaan produk, layanan dan rantai pasokan untuk usaha-usaha dari mitra binaan meskipun telah terdapat kebijakan pemerintah terkait pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Desember 2022. Manajemen telah mengkaji dampak dari peristiwa tersebut terhadap aktivitas TJSL Perusahaan. Berdasarkan hasil kajian saat ini, manajemen berkeyakinan bahwa, dampak negatif jangka pendek tersebut telah dipertimbangkan dan dapat diatasi melalui kebijakan manajemen.

Manajemen akan terus memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait dengan peristiwa ini di masa depan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah)

15. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Pada tanggal 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat ("SAK EP") yang merupakan adopsi dari *IFRS for SMEs* dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP akan berlaku efektif pada 2025 dan diizinkan untuk diterapkan lebih awal. SAK EP akan menggantikan SAK ETAP.

SAK EP disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan bagi entitas privat yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menerapkan SAK EP jika diizinkan oleh regulasi otoritas berwenang.

SAK EP lebih sederhana daripada SAK umum yang berbasis *IFRS*, yaitu:

- Menghilangkan topik yang tidak relevan bagi entitas privat, misalnya laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi.
- Menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi, sehingga entitas privat akan mengikuti kebijakan akuntansi tunggal untuk transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, misalnya, properti investasi diukur dengan model nilai wajar jika tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Jika memerlukan biaya atau upaya yang berlebihan, maka menggunakan model biaya.
- Penyederhanaan beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran.
- Pengungkapan yang lebih sedikit.
- Penggunaan bahasa yang lebih sederhana.

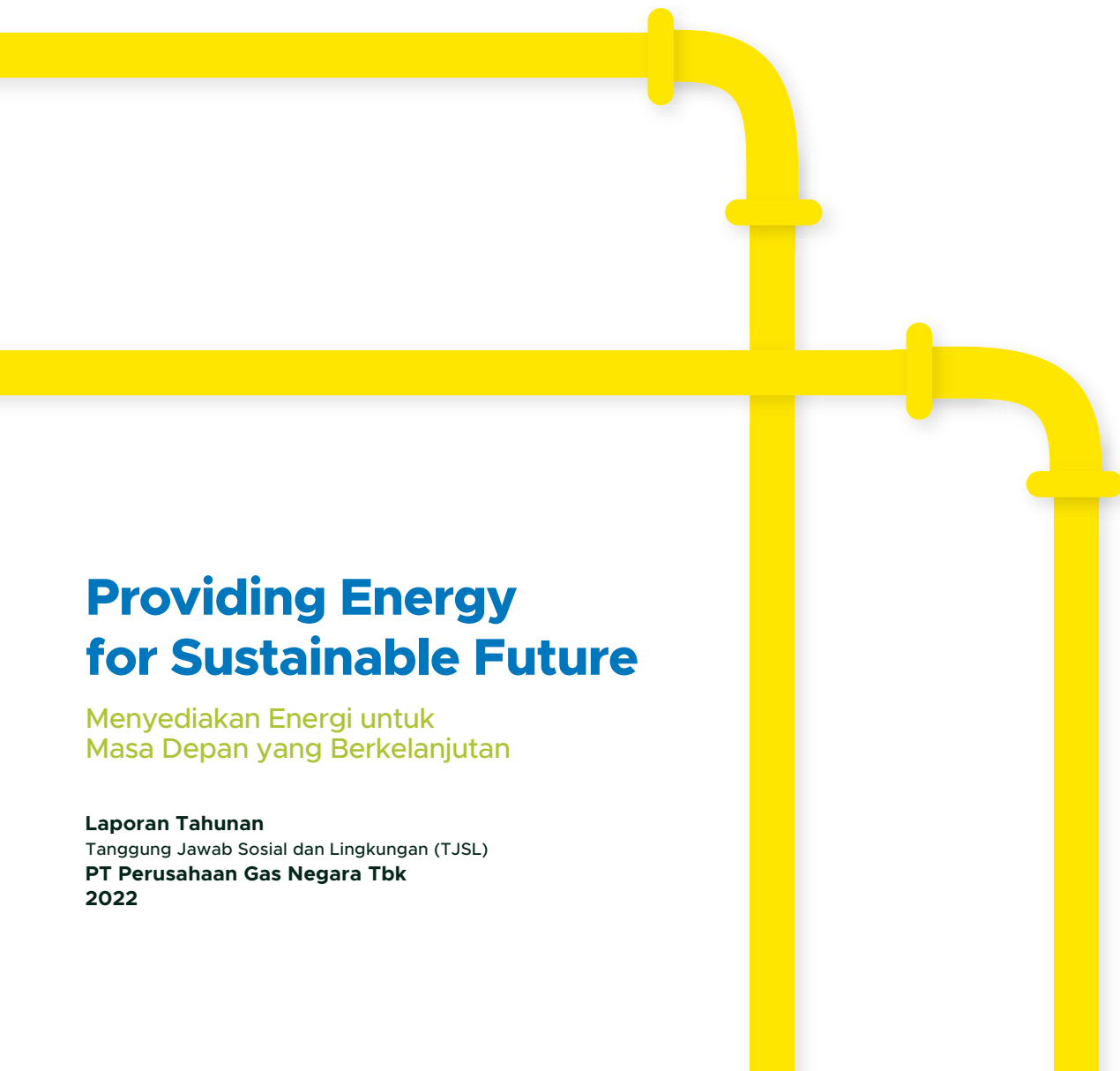
SAK EP memiliki perbedaan yang signifikan dengan SAK ETAP, misalnya penggunaan nilai wajar untuk properti investasi dan aset biologis, penggunaan konsep penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income*), laporan keuangan, kombinasi bisnis dan *goodwill*, pengaturan lebih rinci untuk aset dan liabilitas keuangan, pajak tangguhan, dan lain-lain.

REFERENSI

1. World Bank. (1992). *Development and the Environment: A False Dichotomy*. Diakses dari https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/9780195208764_Chapter1
2. Cordero, R. R., Roth, P., & Da Silva, L. (2005). *Economic growth or environmental protection? Environmental Science & Policy*, 8(4), 392–398. doi:10.1016/j.envsci.2005.04.005
3. Beji, R., Yousfi, O., Loukil, N., & Omri, A. (2021). Board diversity and corporate social responsibility: Empirical evidence from France. *Journal of Business Ethics*, 173(1), 133–155.
4. Gasmi, Nacer. (2020). *Corporate Innovation Strategies: Corporate Social Responsibility and Shared Value Creation*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
5. Kotler, Philip. dan Lee, Nancy. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
6. Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Syukur, Abdullah. (1987). *Studi Implementasi Lalar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.
8. Effendi, Usman. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
9. Wahyuningsih, Desiana. (2022). *Monitoring dan evaluasi untuk tercapainya tujuan kinerja*. Diakses pada tanggal 8 Mei 2023 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
10. Siagian, Sondang P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
11. Salim, Emil. (2018) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diakses pada tanggal 8 Mei 2023 dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/07/02/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-2/>
12. Kates, R.W.; Parris, T.M.; Leiserowitz, A.A. (2005). What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice. *Environ. Sci. Policy Sustain. Dev.* 2005, 47, 8–21.
13. Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2023). Sustainable Development Goals Report. Diakses pada 8 Mei 2023 dari <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>
14. Saptowalyono, C Anto. (2019). Berdayakan Pelaku UMKM. Diakses pada 4 Mei 2023 dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/10/30/berdayakan-pelaku-umkm/>
15. OJK), O. J. K. (2017). POJK Nomor 51/POJK.03/2017. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL_Lampiran_II_POJK_51_-_keuangan_berkelanjutan.pdf
16. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2021. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf>







Providing Energy for Sustainable Future

Menyediakan Energi untuk
Masa Depan yang Berkelanjutan

Laporan Tahunan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

2022